



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT KERJA KOMISI IX DPR RI  
DENGAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN  
KELUARGA/BKKBN**

- Tahun Sidang : 2024-2025  
Masa Persidangan : III  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari & Tanggal Rapat : Rabu, 30 April 2025  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI  
Acara : 1. Membahas evaluasi strategi nasional percepatan penurunan *stunting* dan penguatan program keluarga berencana:  
a. Capaian dan evaluasi program penurunan *stunting*, termasuk efektivitas Gerakan GENTING di Triwulan II tahun 2025  
b. Peninjauan kebijakan penempatan dan kesejahteraan tenaga PKB/PLKB.  
2. Membahas strategi pengendalian kuantitas penduduk dan pencegahan pernikahan usia muda.
- Waktu : Pukul 10.34 s.d. 12.51 WIB  
Ketua Rapat : drg. Putih Sari (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. GERINDRA)  
Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos, M.A. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI)  
Hadir : **A. PIMPINAN DAN ANGGOTA:**  
27 orang Anggota hadir dari 43 orang Anggota dengan rincian sebagai berikut:
- I. PIMPINAN:**
1. Charles Honoris (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-PDI PERJUANGAN)
  2. M. Yahya Zaini, S.H. (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. GOLKAR)
  3. drg. Putih Sari (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. GERINDRA)

**II. ANGGOTA:**

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**

6 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP.,M.Kep
2. Sukur H. Nababan, S.T.
3. Indah Kurnia, S.E., M.M.
4. Dr. Sihar P.H. Sitorus, BSBA., M.B.A.
5. Eko Kurnia Ningsih
6. H. Ahmad Safei, S.H., M.H

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
(F-P. GOLKAR)**

5 orang Anggota dari 7 Anggota

1. dr. Maharani
2. Ranny Fahd Arafiq
3. Teti Rohatiningsih, S.Sos.
4. Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M.
5. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA  
RAYA (F-P. GERINDRA)**

3 orang Anggota dari 5 Anggota

1. Ade Rezki Pratama, S.E., M.M
2. Ir. Sri Meliyana
3. Obon Tabroni

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT  
(F-P. NASDEM)**

3 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Irma Suryani, S.E., M.M.
2. Rahmawati Herdian, S.H., M.Kn.
3. Nurhadi, S.Pd., M.H.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
(F-PKB)**

3 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Zainul Munasichin
2. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I.,  
M.M.
3. Dr. Arzeti Bilbina Setyawan, S.E., M.A.P

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
(F-PKS)**

0 orang Anggota dari 4 Anggota

-

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
(F-PAN)**

2 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag
2. Surya Utama, S.I.P

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
(F-P. DEMOKRAT)**

2 orang Anggota dari 3 Anggota

1. Dra. Lucy Kurniasari
2. Tutik Kusuma Wardhani, S.E., M.M.,  
M.Kes.

**B. PEMERINTAH/UNDANGAN**

1. Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd. (Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN)
2. Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos. (Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN)
3. Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin, Ph.D (Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama)
4. Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM, MPS, MA (Deputi Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Deputi I))
5. Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng. (Deputi Bidang Pengendalian Penduduk (Deputi II))
6. Dr. Drs. Wahidin, M.Kes. (Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Deputi III))
7. Nopian Andusti, S.E., M.T. (Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Deputi IV))
8. Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd. (Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat (Deputi V))
9. Dr. Ucok Abdul Rauf Damenta, Mag.rer.publ. (Inspektorat Utama)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

**Yang kami hormati Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI,  
Yang kami hormati Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga  
beserta seluruh Jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini.**

Puji syukur sama-sama kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa melaksanakan, ya, Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Sebelum rapat kita mulai, alangkah baiknya tentunya kita awali dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing.

Berdoa dimulai.

**(BERDOA)**

Selesai.

Berdasarkan data dari sekretariat Komisi IX DPR RI, jumlah Anggota Komisi IX yang sudah hadir dan menandatangani absensi ada 13 orang, ya, secara fraksi ada 7 fraksi dari 8 fraksi, ya, ada 6 Anggota yang izin. Jadi, tentunya sesuai dengan Peraturan DPR, rapat pada hari ini bisa dinyatakan kuorum, ya, dan bisa kita lanjutkan.

Ya, oleh karena itu, kami meminta persetujuan, saya kira dari Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan pelaksanaan rapat hari ini, ya. Ini dilaksanakan secara terbuka, ya, Bapak/Ibu, ya? Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)  
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.34 WIB)**

*Oke.*

Untuk waktu rapat, saya menawarkan sampai dengan jam 12.00 siang. Sepakat?

**(RAPAT: SETUJU)**

Adapun agenda rapat kerja kita pada hari ini yaitu terkait dengan evaluasi strategi nasional percepatan penurunan *stunting* dan juga penguatan Program Keluarga Berencana, dan juga yang kedua adalah membahas strategi pengendalian kuantitas penduduk dan juga pencegahan pernikahan usia dini.

Tentunya sebelum mendengarkan paparan Pak Menteri, ya, kami minta persetujuan juga ini, ya. Apakah paparan bisa disampaikan kurang lebih 20 menit, Pak Menteri? *Oke*. Untuk itu kami persilakan kepada Saudara Menteri Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga untuk menyampaikan paparannya.

Silakan.

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (Dr. WIHAJI, S.Ag., M.Pd):**

Terima kasih.

Atas izin Pimpinan, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan paparan yang berkenaan rapat kerja pada hari ini.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat pagi,  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
*Shalom,*  
*Om swastyastu,*  
*Namo buddhaya,*  
Salam kebajikan.

**Yang saya hormati Ibu Pimpinan beserta Bapak Pimpinan Komisi IX,  
Yang terhormat seluruh Anggota Komisi IX yang tidak saya sebut satu per satu terima kasih, kemudian  
Yang saya hormati Bu Wamen, Pak Sesmen, Para PTM, Para PTP, dari Kementerian Kemendukbangga,  
dan Bapak/Ibu sekalian yang terhormat.**

Izinkanlah sebelum saya memulai, barangkali ini masih Syawal terakhir kalau enggak salah, walaupun kelewat juga saya mohon maaf. Saya atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Kemendukbangga mengucapkan *taqaballahu minna waminkum taqabbal ya karim*. Mohon maaf lahir batin bagi kita, khususnya keluarga besar Kemendukbangga barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mewakili keluarga besar Kemendukbangga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Untuk selanjutnya, izinkan Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian, berkenaan agenda rapat hari ini sesuai dengan surat yang disampaikan kepada Kemendukbangga yang berkenaan dengan “Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan Rencana Strategi Penguatan Program Bangga Kencana”. Atas izin Pimpinan, *insya Allah* nanti tidak semua *slide* saya sampaikan. Inti-intinya yang tentu berkaitan dengan apa yang ada dalam surat yang tentu hari ini saya sampaikan, saya laporkan kepada Bapak/Ibu sekalian.

### **Pimpinan yang terhormat.**

Ada tema besarnya ada dua yang kemudian kita pilah-pilah dan pilih menjadi 6 yakni tentang capaian dan evaluasi percepatan penurunan *stunting*, kemudian capaian Program GENTING, kemudian yang tema berikutnya berkenaan dengan penguatan Program Bangga Kencana, kemudian pengendalian kuantitas penduduk, kemudian strategi pencegahan pernikahan usia dini atau usia muda, dan yang terakhir kebijakan penempatan dan kesejahteraan tenaga PKB maupun PLKB. Enam tema ini yang nanti saya laporkan, saya sampaikan pada Ibu Pimpinan dan Bapak sekalian Anggota Komisi IX yang terhormat. *Next*.

### **Bapak/Ibu.**

Yang pertama, tentang evaluasi strategi nasional percepatan penurunan *stunting*. Tentu ini bagian dari RPJPN 2025-2045 yang kita memang pernah punya Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang berakhir Desember 2024, yang sekarang prosesnya masih pada tahapan pembahasan untuk memperpanjang perpres tersebut masih ditangani oleh Bappenas dan beberapa kali sudah kita rapat untuk sinkronisasi tentang kelanjutan Perpres 72.

Di luar itu, tentu akan saya laporkan dan saya sampaikan kepada Ibu sekalian tentang kondisi terakhir, termasuk perlu saya sampaikan tentang prevalensi *stunting* yang sampai hari ini memang kita belum mendapat rilis dari Kementerian Kesehatan seberapa prevalensi untuk tahun 2024. Bocorannya 18,8, tetapi ketika saya koordinasi dengan kementerian, belum bisa dirilis. Jadi, mohon maaf ini masih saya kosongkan untuk prevalensi terakhir, kecuali 2023 masih 21,05 dan tentu targetnya untuk 2045 dalam RPJPN ini 14,2%. *Next*.

### **Bapak/Ibu.**

Tentu ada enam yang hari ini saya laporkan dan saya sampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian yang berkenaan dengan isu-isu strategis bagian dari evaluasi yang selama ini menjadi problem di kementerian maupun nanti di lini lapangan.

Yang pertama, saya kira ini problem-problem yang tidak asing lagi buat Bapak/Ibu sekalian, tentu tetap akan saya laporkan dan saya sampaikan sehingga nanti saya minta masukan maupun hal-hal yang berkenaan problem-problem bagian dari evaluasi isu strategis.

Yang pertama, pemahaman masyarakat yang terkait dengan pencegahan *stunting* ini problem tradisional, tapi masih dinamis karena faktanya memang masih ada pemahaman bahwa *stunting* itu dianggap penyebabnya hanya masalah gizi. Padahal ada juga mulai dari prahamil, ada pernikahan dini, ada sanitasi, dan lain sebagainya.

Yang kedua, tentang intervensi yang selama ini belum terfokus pada pencegahan dan masih berorientasi lebih banyak pada penanganan anak-anak *stunting* sehingga kritik tentang Perpres 72 yang ditangani oleh 32 K/L ternyata belum efektif yang kemudian hasil diskusi, kita perlu disiplinkan, kita perlu presisikan tentang intervensinya. Termasuk tentu fokus yang untuk mencari, bukan mencari anak yang *stunting*, tapi yang berisiko dan potensi. Ini menjadi PR yang kalau di dalam bahasa di kementerian kita adalah KRS (Keluarga Risiko *Stunting*).

Yang ketiga, laporan capaian program perlu lebih kualitas, bukan hanya sebatas pemenuhan cakupan. Ini bagian dari yang selama ini pemahamannya yang menurut saya menjadi catatan.

Kemudian yang keempat, belum sepenuhnya memanfaatkan data hasil survei atau *surveillance* sebagai *database* untuk evaluasi dalam pengambilan keputusan dan intervensi. Bahasa sederhananya, siapa yang diintervensi, siapa yang disurvei tidak linier, kira-kira begitu sehingga ini menjadi problem juga.

Yang kemudian yang kelima, intervensi terkesan hanya pada yang bermasalah gizi. Sementara ada program-program lain yang tentu melibatkan *stakeholder* terkait, misalnya pernikahan dini harus dengan menteri koordinasi, mohon maaf, koordinasi dengan Kemenag. Kemudian juga sanitasi dan sebagainya.

Yang terakhir, penandaan anggaran *stunting*, ini masalah pembiayaan, saya kira, yang tentu anggaran idealnya memperhatikan komposisi tentang intervensi sensitif, spesifik, maupun koordinasi tata kelola, dan ini tentu menjadi hal yang, yang selalu, saya ulangi, selalu, ya, butuh untuk pembiayaannya. *Next*.

Dari evaluasi, tentu, mohon maaf, ada ringkasan yang perlu saya sampaikan kepada Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian, ada 4 yakni dari hasil evaluasinya masih perlunya penajaman dan *refocusing* untuk pelaksanaan

intervensi PPS pada aspek pencegahan dan memperhatikan kelompok sasaran berdasarkan data yang *ter-update*. Ini menjadi bagian dari yang hasil evaluasi kita.

Kemudian juga perlu penguatan kelembagaan TPPS di pusat dan di daerah, dan penguatan fungsi koordinasi dan tanggung jawab antar pelaksana. Ini saya kira bukan sesuatu yang baru juga selama ini.

Terima kasih, Pak Charles, izin melanjutkan.

Kemudian yang ketiga, perlu peningkatan komitmen dan pemahaman terkait peran masing-masing PIA dan perhatian khusus terhadap kapasitas pengelola program ini, tentu problemnya di lapangan, baik nanti hubungannya dengan pemerintah daerah dan sebagainya karena ini tidak bisa kita kerjakan sendiri, Kementerian Kemendukbangwa sendirian tidak bisa. Perlu juga komitmen dari pihak-pihak lain yang berkenaan dengan kebersamaan dalam menyelesaikan problem *stunting*.

Kemudian empat, *refocusing* indikator terkait PPS yang dipantau dan memperbaiki *tagging* dan *tracking*. Tentu ini bagian dari alat untuk penajaman, perencanaan, dan penganggaran. *Next*.

Mohon maaf, ringkas, ringkas, ringkas.

### **Bapak/Ibu.**

Ini bagian dari alur yang menurut kementerian kita bahwa kita tidak bisa kerja sendirian maka perlu peran strategis dari pemerintah daerah yang dalam hal ini, pelaksanaan Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*. Baik, mengenai perencanaan pembangunan daerah mesti juga dalam hal ini bagaimana pemerintah daerah ikut bertanggung jawab ketika ada RPJMD. Dan perlu saya laporkan, Pimpinan, bahwa kita sudah pernah melalui Zoom menyampaikan kepada kepala daerah baru melalui Kepala OPDKP-nya tentang RPJMD ini, harapan kita semua pemerintah daerah ikut di dalam RPJMD-nya, ada program-program yang berkenaan dengan kementerian kita, termasuk *stunting*.

Kemudian yang kedua, penganggaran tepat sasaran dan berbasis bukti, kemudian sampai ke yang terakhir, peningkatan kapasitas aparatur daerah. Ini hubungannya dengan peran strategis pemerintah daerah yang memang mempunyai, masyarakatnya yang memang mengerti lini lapangannya dan kita tidak bisa lepas dari pemerintah daerah yang memang itu masyarakat kita ada di daerah. *Next*.

**Bapak/Ibu.**

Ada persoalan *stunting* saat ini yang saya kira ini sudah menjadi pemahaman bersama, mulai dari KRS kita berdasarkan data terakhir pemutakhiran data ada 8,6 juta sebagai kelompok KRS (Keluarga Risiko *Stunting*) yang penyebabnya ada empat. Pertama, nutrisi, karena air bersih, karena edukasi, yang itu memang bagian dari yang terus-menerus, dan yang terakhir karena jamban sehat dan rumah layak huni. Dari prevalensi ini sekali lagi saya sampaikan, Bapak/Ibu, untuk tahun 2024 belum kita cantumkan karena memang dari Menteri Kesehatan belum merilis secara resmi. *Next*.

Kemudian poin yang kedua tentang capaian program penting, Bapak/Ibu. GENTING ini Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* yang dulu raker yang kedua telah saya laporkan kepada Bapak/Ibu, pada Pimpinan, bahwa ini perkembangannya. Dari 38 provinsi sudah terbentuk tim pengendalinya 35, kemudian dari kabupaten 514 sudah terbentuk 263. Ada beberapa yang memang belum terbentuk tim pengendali untuk Program GENTING. Ya, programnya macam-macam, ada yang memang belum selesai pilkadanya, ada yang susulan yang memang belum dibentuk karena ketuanya kepala daerah. *Next*, sebagai laporan saja.

**Bapak/Ibu.**

Seberapa data yang bisa kita peroleh dari Program GENTING, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*? Per 28 April ini yang perlu saya laporkan kepada Bapak/Ibu. Ada 141.382 anak asuh yang diasuh oleh 20.396 dengan berbagai kategori, baik yang anak asuh maupun orang tua asuhnya. Ada nutrisi maupun nonnutrisi. Ini penjelasannya, *next*.

Ini, Bapak/Ibu, jumlah dari 141.000 tadi terdiri dari bantuan nutrisi 115.000, akses air bersih 2.623, rata-rata ini kerja sama dengan TNI di masing-masing daerah. Kemudian ada edukasi yang kerja sama dengan pihak kampus 22.000, dan jamban sehat dan rumah layak huni itu rata-rata kolaborasi dengan korporasi, 959. *Next*.

Ini, Bapak/Ibu, per provinsi. Mungkin nanti juga perlu saya sampaikan semuanya bahwa inilah data yang hari ini sudah masuk per 28 April tentang data yang berkenaan dengan anak asuh per provinsi, mulai dari DKI Jakarta sampai Papua Barat, dan memang masih ada yang nol. Ini yang mesti kita terus kerjakan, terutama wilayah-wilayah tertentu butuh keseriusan dari kita yang di lini lapangan, maupun dari kepala perwakilan masing-masing. Ini jumlahnya, Bapak/Ibu sekalian, dari anak asuh maupun orang tua asuh terdiri dari BUMN, swasta, perguruan tinggi, NGO maupun perorangan dan media. *Next*.

Ini termasuk yang tadi terjemahannya yang nutrisi berapa ribu, yang nonnutrisi berapa ribu. Ini datanya ada semua per provinsi dan nanti bisa di-*breakdown* per kabupaten. *Next*.

Mohon maaf, ini contoh-contoh saja, Bapak/Ibu, ada yang di Sulawesi, balik, *back*, ya, ada yang di Manado, Sulawesi Utara, ada yang di Serang, Banten, ada yang di Sumatera Barat, Sijunjung. Contoh-contoh untuk bantuan sanitasi. *Next*.

Kemudian untuk tema berikutnya untuk Program Bangga Kencana.

### **Bapak/Ibu.**

Ini bagian dari alur desain maupun *grand design* yang berkenaan dengan Bangga Kencana yang saya mulai dengan situasi kependudukan di Indonesia. Ini teori umum dan Bapak/Ibu saya kira sudah luar biasa tentang ini. Ini singkat saja. *Next*.

Ini yang perlu saya laporkan kepada Bapak/Ibu sekalian, Ibu Pimpinan, yang berkenaan dengan proyeksi penduduk di Indonesia yang hari ini sekitar datanya itu 281 juta penduduk Indonesia yang kemungkinan berdasarkan proyeksi tahun 2029 sekitar 292 juta. Yang menjadi masalah adalah angkanya berapa, bayinya berapa, badutanya berapa, balitanya berapa, remajanya berapa, wanita usia suburnya berapa, dan lansianya berapa. Karena inilah siklus kehidupan yang ditangani oleh Kementerian Kemendukbangga dan ini basis datanya yang perlu saya laporkan kepada Bapak/Ibu yang berkenaan dengan Bangga Kencana karena ini semua yang nanti akan kita urus. *Next*.

### **Bapak/Ibu.**

Ini konsep kebijakan kependudukan yang kita namai dengan *grand design* kependudukan, mohon maaf, *grand design* pembangunan kependudukan. Ini kita buat peta jalannya yang nanti *outcome*-nya adalah membangun keluarga berencana yang baik atau Bangga Kencana yang ini harapannya menjadi cita-cita kita. Mulai dari *grand design*, kemudian peta jalan, rencana aksi sampai indikator sehingga nanti biar *outcome* dan *output*-nya jelas dengan berbagai problemnya. *Next*.

Arah kebijakan untuk tema yang ketiga, arah kebijakan pengendalian kuantitas penduduk dan pembangunan keluarga 2025-2045. Ini tentu yang menjadi alat ukurnya adalah TFR sebagai pengendali kependudukan dalam hal ini adalah tentang tumbuh seimbang penduduk, kemudian NRR yang menurut saya

satu itu normal, baik untuk menjaga pertumbuhan penduduk, angka kelahiran terkendali, suplai penduduk usia produktif maupun untuk memperpanjang periode peluang ekonomi. *Next.*

### **Bapak/Ibu.**

Untuk rancangan arah kebijakan dan strategi, izin, Pimpinan, tentu ini belum selesai karena masih renstra, tentu nanti akan kita masukkan, Ibu Pimpinan, Bapak/Ibu sekalian, Anggota Komisi IX, yang berkenaan dengan renstra Kemendukbangga 2025-2029, mulai dari menerapkan sinergi kebijakan pengendalian penduduk secara holistik dan komprehensif, kemudian meningkatkan ketahanan dan seterusnya, sampai pada meningkatkan kualitas pergerakan Program Bangga Kencana, peran serta masyarakat, dan dukungan mitra kerja secara umum. Kita sebut dengan *pentahelix* kita yang melibatkan banyak *stakeholder*. Ini renstra yang saya kira nanti dielaborasi dan saya berharap ada masukan yang berkenaan dengan renstra ini. *Next.*

Mohon maaf, Ibu Pimpinan, mungkin saya agak singkat-singkat karena waktu.

Kemudian ada juga yang perlu saya laporkan yang berkenaan dengan kerangka Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana yang terorganisir. Ini ada 4 hal sebagai faktor kunci dalam ukuran kita dalam keberhasilan mendukung Program Kependudukan Bangga Kencana, termasuk, mohon maaf, kelembagaan yang hari ini 32. Kita punya 32 kantor perwakilan, kemudian koordinator yang kita masih ada beberapa provinsi, mohon dukungannya. Saya nanti berusaha untuk membentuk, walaupun belum ada perwakilan, tapi koordinator seperti ke Kaltara yang sementara belum ada kanpernya, belum ada kantornya, tapi koordinator. Nanti termasuk di Papua, izin, Pimpinan, ada beberapa yang memang belum ada kantor perwakilan. Saya izin untuk membentuk koordinator biar nanti ada keadilan.

Kemudian juga ada 18.000 tenaga lapangan, ada 1,2 juta kader sukarela, 600 TPK dan pelaksana kegiatan di kampung KB. Secara singkat, tentu kuncinya adalah dukungan dari Bapak/Ibu sekalian, baik Pimpinan maupun Anggota Komisi IX yang tentu program yang ini tidak bisa berdiri sendiri dan butuh keterlibatan semua pihak yang kita sebut dengan *pentahelix*. Tentu banyak mulai dari kerangka regulasinya, skema pendanaannya, dan sebagainya. Nanti saya mohon masukan dari Bapak/Ibu sekalian. *Next.*

Indikator peta jalan kependudukan dan pembangunan keluarga tahun 2025-2029 ini ada sekitar 30 capaian dan hal-hal yang berkenaan dengan peta jalannya, dan ini berkenaan dengan kependudukan, baik pengendalian kuantitas

penduduk, kemudian sasaran 1, 2, 3. Peningkatan kualitas penduduk mulai pendidikan, kesehatan, ekonomi. Kemudian pembangunan keluarga mulai indeks pembangunan keluarga, indeks perlindungan anak dan sebagainya. Ini tentu banyak indikator yang harapan kita *step by step* ini akan kita kerjakan, tentu dengan berbagai sasarnya, sasaran 1, 2, 3, 4 sampai 5 sebagai bagian dari integrasi data kependudukan. *Next*.

**Bapak/Ibu.**

Apa strateginya? Ini yang tentu kita diskusikan sekaligus apa yang sudah kita kerjakan dengan bagaimana membangun harmonisasi kebijakan dan strategi lintas sektor, baik program kependudukan dan pembangunan keluarga, serta rencana aksi nasional tahun 2025-2029. Kemudian ada kesepakatan semester 1 dan seterusnya, 1, 2, 3 termasuk ini triwulan 2 yang tentu ini nanti bagian yang akan kita kerjakan dan sekaligus rekomendasi yang berkenaan dengan kebijakan apa sektor kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana.

Tentu harapannya bahwa *outcome*-nya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dapat membantu tentang tingkat kelahiran, pengendalian dalam hal ini. Kemudian akses yang lebih baik tentang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta membuat keputusan yang lebih tepat tentang jumlah. Nah, ini bagian dari strategi dalam pengendalian kuantitas penduduk. *Next*.

Ini tema berikutnya tentang pencegahan pernikahan usia muda. Saya secara umum dulu, Bapak/Ibu sekalian, ini tren prevalensi untuk perkawinan anak satu dekade 2014 sampai 2024. Angka ini menunjukkan kalau ada 100 orang nikah kira-kira ada enam yang pernikahan dini, kira-kira begitu angkanya ini, 5,9% dari prevalensi perkawinan anak usia muda. Ini datanya diambil dari UNICEF dan Susenas 2004, 2014-2024. *Next*,

**Bapak/Ibu.**

Ini juga angka dan data yang berkenaan dengan apa yang saya sampaikan tadi karena nanti ada hubungannya, ya, dengan dianggap pernikahan muda umur 15 sampai 19. Ini angkanya pada tahun 2024 terdapat 18 dari 1.000, yang perempuan berumur 15 sampai 19 tahun di Indonesia. *Next*.

Kenapa ini perlu disampaikan, Bapak/Ibu? Karena inilah yang cikal bakal yang dalam hal ini untuk edukasi pernikahan dini. Karena inilah yang menjadi objek dari kita yang berkenaan dengan pernikahan muda, salah satunya adalah ini yang sudah terbentuk, baik PIKR maupun KBKR dan ini ada dalam DIM Kedeputusan Pusdatin datanya dan dikelola langsung oleh teman-teman yang berkenaan dengan Pak Novian, ya. *Next*.

Berapa kekuatannya yang menjadi potensi ini, Bapak/Ibu sekalian, yang perlu saya laporkan kepada Bapak/Ibu sekalian tentang ini yang ada di Indonesia. Ada 603.887 remaja GenRe, GenRe. Saya ulangi, ini yang masuk dalam kelompok GenRe, tentu remajanya banyak, tapi tidak semuanya dan ini saya kira yang menjadi potensi yang selama ini menjadi kekuatan baru bagi mereka untuk menjadi contoh maupun inspirasi agar tidak melakukan pernikahan dini, baik melalui Duta GenRe yang sampai desa, walaupun tidak semuanya terbentuk. Kemudian PIK R yang juga tidak semuanya terbentuk, kemudian forum GenRe.

Datanya, Bapak/Ibu sekalian, itu saya sampaikan kepada Ibu Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian. Dari data GenRe agak lumayan, tinggal nanti dioptimalisasi. Mestinya, sih, kalau signifikan harus bagus dan memperkecil untuk pernikahan dini. *Next*.

Ini kegiatan-kegiatannya, Bapak/Ibu sekalian, baik Kelas Pranikah, Siap nikah, Siap Nikah *Goes To Campus* untuk memberikan edukasi, kemudian kelas Orang Tua BERSAHAJA, *live instagram*, kemudian Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Itu bagian yang kemarin kita kerjakan supaya edukasi dan pemahaman sejak dini jangan sampai melakukan pernikahan dini. Ini kegiatan-kegiatan kita. *Next*.

Terakhir, Bapak/Ibu sekalian, tentang kebijakan penempatan dan kesejahteraan tenaga penyuluh KB. Tentu ini saya laporkan dulu tentang data, Bapak/Ibu, di tempat kita ada 18.000 sekian atau 18.086. Ini data ada penyuluh KB, ada PLKB, kemudian ada juga penyuluh KB/PLKB non-ASN yang sekarang saya kira menjadi isu, harapannya ini ikut di kementerian kita.

Jadi, saya sampaikan, saya laporkan ke Bapak/Ibu bahwa yang satu, mohon maaf, 11.160 itu penyuluh KB/PLKB yang diangkat oleh pemerintah daerah, yang digaji oleh pemerintah daerah, yang sekarang semangatnya ingin dengan kita, ini perlu saya laporkan kepada Bapak/Ibu sekalian. Sementara yang di kementerian kita ada PNS-nya 9.791, kemudian P3K-nya 8.295 atau 28,4%. Ini perlu saya jelaskan yang tadi.

Tentu ini yang, yang menjadi masalah, penempatan penyuluh KB/PLKB menjadi tanggung jawab pemerintah daerah karena ini memang sudah ada peraturannya yang dulu, tapi yang menjadi isu begini kira-kira, perlu saya laporkan kepada Bapak/Ibu ada yang sudah ditetapkan di provinsi tertentu berdasarkan SK lama. Kemudian agak lumayan yang ingin pindah ke tempat asalnya, nah ini agak lumayan. Kemarin yang surat diberikan kepada Ibu, itu salah satunya, itu, Bu. Jadi, ada beberapa, terutama perlu saya laporkan kepada Ibu Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian, teman-teman penyuluh P3K yang di NTT, yang kebetulan banyak dari

Bali. Nah, yang kemudian mendaftar di NTT, diterima di NTT, kemudian sekarang banyak mereka ingin kembali ke Bali. Itu bagian dari yang kemarin surat dari Ibu yang sudah saya terima dan ini menjadi hal yang saya laporkan kepada Bapak/Ibu.

Selain nanti isu yang lebih penting, tentu kesejahteraan. Karena dari tindak lanjut rapat kemarin, Ibu Pimpinan, izinkan saya menyampaikan, ya, dukungan dan dorongan dari Pimpinan Komisi IX dan Anggota Komisi IX yang berkenaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dari tim pendamping keluarga yang sampai hari ini belum dapat. Kalau insentif, intensif, insentifnya, 210 sampai 310.000, tapi untuk BPJS Ketenagakerjaannya belum. Kecuali yang Anggota lain karena di tim ini ada bidan. Kalau bidan PNS *oke*, sudah, tapi yang kader keluarga berencana sekitar 200.000 atau sepertiganya itu belum dapat dan ini saya kira perlu saya laporkan kepada Bapak-Ibu yang berkenaan dengan masalah tenaga lapangan dalam Program Bangga Kencana. *Next*.

Ini datanya, Bapak/Ibu, sebarannya. Perlu saya laporkan kepada Ibu Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian. Di masing-masing provinsi dan nanti juga *deliver* sampai di kabupaten/kota. Tentu kebutuhan rasionya menurut hitungan kebetulan kita, satu banding lima. Hari ini agak lumayan. Kalau kebutuhan pasti lebih kurang atau bahasa kita kurang penyuluh dan tentu nanti minta masukan dari Bapak sekalian karena memang ada yang pensiun, sementara pengangkatannya juga kecil. *Next*.

Saya kira, itu Bapak/Ibu sekalian. Ada dua tema yang perlu saya laporkan. Saya terima kasih atas waktunya dan tentu saya minta memohon untuk masukan, kritik dan hal lain-lain yang tentu bagian dari semangat untuk bisa melaksanakan program di kementerian kita dan harapan kita, masukan ini menjadi sesuatu yang penting di kementerian kita untuk bisa melaksanakan program-program yang berkenaan dengan, khususnya hari ini yang kita bahas dalam raker dengan Pimpinan dan Komisi IX.

Terima kasih, sekian.

*Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih, Pak Menteri, atas paparannya yang sudah disampaikan.

Selanjutnya langsung saja untuk bisa mendapatkan masukan dan juga, ya, pendalaman, ya, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi, ya.

Kami persilakan kepada para Anggota Komisi IX. Yang pertama, kesempatannya kepada Ibu Irma Suryani.

Silakan, Bu Irma. Bersiap, Ibu Tuti Kusumawardani.

**F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.,M.M.):**

Iya. Terima kasih, Pimpinan.

Saya selalu diberi posisi pertama terus karena yang saya suruh ini pertama enggak mau, sini pertama enggak mau. Saya terpaksa, deh, yang pertama. Spesial, spesial.

Terima kasih.

**Pimpinan yang saya hormati,  
Kawan-kawan Komisi IX yang saya hormati,  
Menteri BKKBN, ya, yang saya hormati, berikut seluruh Jajaran.**

Yang pertama, tentu saya mengapresiasi paparan yang sudah disampaikan hari ini. Ada perbaikan, selalu ada perbaikan dari yang baru-baru ini ada perbaikan dalam menyampaikan tata kelola.

Yang pertama, tentu saya ingin menyampaikan terkait dengan koordinasi efektif antara pusat dan daerah terkait dengan otonomi daerah yang sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena sering kali program pusat itu enggak berjalan di daerah karena katanya daerah sering dibilang enggak punya duit, banyak sekali. Saya sering sekali itu, apa, mengadvokasi keluarga-keluarga *stunting* yang tidak dipedulikan oleh pemda, di dapil saya, Sumatera Selatan. Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian. Komunikasi efektif antara Bapak dengan gubernur, bupati, wali kota di daerah itu penting menurut saya. Karena saya sampai mengamuk-amuk, begitu ya, karena ada banyak keluarga *stunting* itu sudah ngomong saya, di TikTok saja enggak, enggak pada peduli, begitu. Nah, ini nih, yang kayak begini-begini harus mulai diefektifkan, ya. Jangan sampai yang seperti kemarin-kemarin, tuh, begitu, ya, cuma di atas kertas tapi enggak jalan. Nah, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, bagaimana strategi Kemendukbangga Kencana dalam memfokuskan intervensi *stunting* pada kelompok yang paling berisiko dan berpotensi terdampak? Kemudian sejauh mana data *surveillance* dan data Keluarga Risiko *Stunting* (KRS) digunakan secara aktif dalam perencanaan program *stunting* di daerah-daerah?

Selanjutnya, bagaimana Kemendukbangga memastikan program *stunting* diintegrasikan secara konkret dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Nah, ini yang saya tadi bilang tadi, ya, RPJMD-nya, RKPD, kemudian APBD. Nah, ini penting juga untuk dikoordinasikan, Pak Menteri, Ibu Wamen, komunikasi efektifnya harus jalan. Kalau enggak, nih, sama saja bohong, nih, *lip service* semua nanti akhirnya. Apa langkah konkret Kemendukbangga dalam memperkuat koordinasi TPPS dan tim pengendali GENTING, baik di tingkat pusat maupun daerah?

Selanjutnya terkait program Bangga Kecana dan GenRe. Nah, ini yang kita juga ikut serta di dalamnya untuk melakukan sosialisasi. Perlu kami sampaikan bagaimana Kemendukbangga melihat posisi strategis program Bangga Kecana dan GenRe dalam mengendalikan kuantitas, kuantitas penduduk di masa yang akan datang.

Pemerintah telah meluncurkan GENTING sebagai intervensi gerakan dan fokus pada balita dan ibu hamil. Capaian prevalensi *stunting* nasional masih perlu diturunkan dari angka 21,6 di 2022, ya, Pak? Menuju target 14% pada 2024.

Dari data aplikasi e-PPGBM Dinas Kesehatan Dinkes Sumsel, dapil saya, per-Oktober 2024 sebanyak 6.092 balita mengalami *stunting* atau gizi buruk. Angka tersebut meningkat cukup tajam dibandingkan tahun lalu dan menjadikan Sumsel sebagai wilayah daerah darurat *stunting*. Dapil saya, nih, Pak. Nah, ini perlu menjadi perhatian khusus untuk daerah-daerah yang seperti ini. Karena ini dapil saya maka saya sampaikan kepada Bapak untuk bisa menjadi perhatian.

Perlu Bapak pahami bahwa selalu, ya, selalu anggaran menjadi masalah. Nah, kita hari ini punya program yang namanya Makan Bergizi Gratis. Ada dana dan anggaran di situ untuk anak balita, ibu hamil juga, ya, di sana, di dalam sana. Nah, bagaimana dengan anggaran penurunan *stunting* ini di tempat Bapak, nih, di kementerian Bapak? Jangan sampai kemudian *overlapping*. Nah, ini yang juga saya ingin mendapatkan jawaban secara komprehensif agar anggaran yang dikeluarkan pemerintah itu tidak tumpang tindih dan menjadi efektif konstruktif, ya, dalam rangka penurunan *stunting*.

Saya kira, itu saja yang saya ingin sampaikan kepada Bapak. Mudah-mudahan ke depan bukan hanya paparannya yang bagus, tapi pelaksanaannya juga bagus dan kita akan memberi waktu Bapak 6 bulan. Kalau Bapak selama 3, 6 bulan ini enggak ada perubahan, pasti saya hajar lagi, Pak, ya.

Terima kasih. Saya tutup dengan

*Wallahul muwafiq ila aqwamithoriq,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih, Bu Irma.

Lanjut.

Charles ketawa ini.

Bu Tuti, persiapan Nurhadi.

**F-P. DEMOKRAT (TUTIK KUSUMA WARDHANI, S.E., M.M., M.Kes):**

Terima kasih.

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi IX beserta seluruh Anggota Komisi IX,  
Yang saya hormati Bapak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan  
Keluarga beserta seluruh Jajarannya.**

Mungkin di sini saya menggarisbawahi hanya sebagai tambahan saja sedikit, yaitu mengenai program Generasi Berencana. Di mana untuk mencegah pernikahan usia muda cukup baik nanti adanya juga dukungan dari PKBI karena PKBI adalah Duta GenRe yang ada, GenRe yang ada sampai ke tingkat desa dengan membuat program-program yang berkesinambungan. Tentunya jangan lupa juga hanya mengedukasi asosiasi penghulunya saja, tetapi mungkin sebagai hakimnya juga perlu untuk diedukasi karena beliau adalah yang mengeluarkan dispensasi tentang pernikahan remaja itu, terutama yang di bawah umur 19 tahun.

Sekian, terima kasih.

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

Terima kasih, Bu Tuti.

Pak Nurhadi, silakan. Bersiap, Pak Eko.

Eh, Ibu Eko.

Pak Nurhadi dulu, ya, baru Bu Eko.

**F-P. NASDEM (NURHADI, S.Pd.,M.H.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI,  
Yang saya hormati Pak Menteri, Bu Wakil Menteri, dan seluruh Jajaran sehat  
dan bahagia selalu.**

Yang pertama, saya ingin menyoroti kaitannya ini juga termasuk dapil saya, Pak, ini di Jawa Timur, dapilnya Pak Heru juga. Saya menyoroti lambannya pembentukan tim pengendali GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*) di Jawa Timur. Kalau dari paparan Bapak tadi, saya melihat dari 38 kabupaten, Pak, baru 14 yang membentuk tim. Artinya ada sekitar 24 daerah atau sekitar dua pertiga wilayah Jawa Timur ini belum aktif.

Ini mencerminkan minimnya keseriusan dari kepala daerah dalam memerangi *stunting*. Padahal ini program yang sangat bagus ini, Pak, kita sangat mendukung. Saya selaku Anggota Komisi IX dengan tegas meminta kepada Pak Menteri beserta jajaran jangan hanya Bapak luar biasa memaparkan sebagai ini, ya, kaitannya laporan data tadi, tapi bagaimana langkah-langkah strategis yang Bapak ambil? Apakah itu langkah secara administratif, atau semacam ada *reward* dan *punishment*, apabila kita temui daerah-daerah yang abai terhadap pencegahan *stunting* ini sehingga ini mau enggak mau akhirnya menghambat target kita yang nanti jangka panjangnya di 2045 menuju 5%. Bila perlu diumumkan saja ke publik, Pak, daerah-daerah mana saja yang tidak patuh.

Kemudian yang kedua, program-program yang cukup dibanggakan oleh Kemendukbangga seperti GenRe, BKR sampai Kelas Pranikah, ini kami merasa masih belum menjangkau sampai lapisan masyarakat tingkat bawah, Pak. Bahkan di masyarakat yang rentan, termasuk juga di dapil kami ini banyak pesantren-pesantren, kan. Nah, ini yang perlu disosialisasikan lebih masif.

Dan yang ketiga terkait tenaga PLKB di lapangan yang jumlahnya juga jauh dari ideal. Ini Bapak di atas setrumnya gede 220, tapi di bawah setrumnya enggak sama, Pak. Ya, ini enggak linier. Rasio satu penyuluh untuk 5 desa jelas tidak masuk akal bagi saya, apalagi di Kediri, Tulungagung, Blitar, mungkin sekitarnya, Jombang, Nganjuk, Mojokerto, ini wilayahnya terpencar.

Jadi, kami mendorong Kemendukbangga untuk melakukan rekrutmen tenaga, apakah itu ASN baru atau pun memberikan semacam afirmasi khusus, lah, kepada daerah-daerah yang kekurangan tenaga PLKB.

Terima kasih, Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

*Walaikumsalam.*

Terima kasih, Pak Nurhadi.

Lanjut, Ibu Eko Kurnia Ningsih. Kalau baca depannya spontan panggilnya "Pak". Ibu padahal, ya.

Silakan, Bu Eko.

Bersiap, Pak Heru, ya.

**F-PDI PERJUANGAN (EKO KURNIA NINGSIH):**

Terima kasih.

**Ibu Pimpinan beserta teman-teman yang saya hormati,  
Bapak Menteri serta jajaran yang saya hormati.**

Dalam hal pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Indonesia, terdapat tenaga lini lapangan yang berperan penting yaitu PLKB dan PKB untuk menunjang keberhasilan Program KB dan pembangunan keluarga di Indonesia. Yang saya tanyakan, apa langkah konkret BKKBN dalam menjamin dukungan dan insentif memadai bagi tenaga lapangan ini? Karena walau bagaimana pun, untuk menyejahterakan tenaga lini lapangan, ini yang utama. Karena di Provinsi Bengkulu, Pak, saya di Provinsi Bengkulu banyak sekali tenaga PLKB dan PKB yang merasa terbebani dan mengeluh, mengeluh soal kesejahteraan dan beban kerja yang tinggi, termasuk kendala pasal skema *reimbursement* yang rumit. Itu yang pertama, Pak.

Yang kedua, sehubungan dengan Program Bangga Kencana. Apakah sistem seperti pencatatan, pelaporan, gizi berbasis masyarakat elektronik yang dikelola Kemenkes dan juga SIGA (Sistem Informasi Keluarga) dikelola BKKBN sudah berjalan dengan efektif dan terintegrasi dengan baik? Terutama di wilayah

yang akses internetnya terbatas atau di daerah 3T. Nah, ini terjadi di daerah saya, Pak, karena di daerah saya Provinsi Bengkulu di desa-desa banyak sekali yang belum ada internet atau keterbatasan internet. Nah, ini yang perlu sekali kita perhatikan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

Ya, terima kasih, Bu Eko.

Pak Heru, silakan.

Bersiap, Ibu Teti.

**F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHOJONO, M.M.):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih, Ibu Pimpinan, Teman-teman Komisi IX, Pak Menteri dan seluruh jajaran.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Nuwun sewu* Pak Menteri, ada hal yang ini terus berulang mulai dari dulu mungkin pada saat Pak Menteri jadi Bupati, apa yang disampaikan oleh Bu Irma pemerintah daerah, kabupaten maupun kota, itu harus dipancing agar dia bisa mendampingi anggaran yang dari pusat. Jadi, pusat memberikan anggaran, pendampingnya adalah APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota untuk menangani *stunting*.

Pada saat kita menangani *stunting*, itu, kan, komprehensif Pak Menteri, bukan hanya BKKBN saja, bukan hanya dinas kesehatan saja. Karena yang ditangani adalah mulai calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan sampai, apa namanya, ibu balita. Oleh sebab itu, termasuk dinas-dinas teknis karena ada, harus ada PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), rumahnya harus dipleset berarti kan harus dengan Dinas PUPR.

Semua ini kalau tidak masuk di dalam perencanaan yang tadi disampaikan Bu Irma, APBD pada saat kita menyusun APBD enggak akan jalan. Itu mungkin pengalaman Pak Menteri selaku bupati, kami juga. Nah, itu harus ada dana stimulus dari pusat agar didampingi oleh kabupaten/kota. Kalau itu pendampingan itu di jalan, selanjutnya begini, mungkin Pak Menteri jadi Wali, "Pak Lurah, ini saya

ada uang 100.000. Tolong, ya, opo carane omah ini, omahnya Bu Siti ini diplester, dibikin rumah sehat,” dikasih 100.000. Dia akan cari tambahan dan rumah itu menjadi rumah sehat. Zaman keluarga, zaman komunal itu adalah salah satu yang tergabung di dalam menangani *stunting*. Yang pertama itu, koordinasi antar dinas.

Yang kedua, Pak Menteri, PLKB, PKB Bapak yang ada di daerah ini dititipkan di semua dinas. Ada yang di Dinas Kesehatan, ada yang Dinas Pemberdayaan Perempuan, ada yang dinas pemerintah, dan lain sebagainya. Induknya enggak tahu. Nah, tapi di kecamatan ada kantor *panjenengan*, nah di situ *ngumpul* ada satu, yang disampaikan oleh Pak Nurhadi tadi, lima. Pramusajinya enggak ada, adminnya enggak ada, mereka urunan. Saya dapat info urunan 200.000-an untuk menggaji satu orang 1 juta.

*Panjenengan* punya Kepala Perwakilan BKKBN Jatim sangat hebat, turun terus. Tenaga *panjenengan* di PLKB, PKB bagus semuanya, bagus. Tinggal satu hal yang memang Pak Menteri harus mendeteksi ke bawah karena ini sudah jalan. Yang jelas bahwa penanganan *stunting* ini apa yang disampaikan oleh Bu Irma tadi ada BGM dan, apa namanya, OPD provinsi yang terkait dan ini harus dibikin seperti dulu pada saat kita KB awal itu. Kan ada satgasnya waktu itu.

Jadi, waktu *nyaleg* terus ada satgas. Ada vasektomi, dicek, “Siapa yang ikut vasektomi?” ditambahi dikasih uang 5.000, eh, 500.000, yang mau vasektomi. Kan itu datang, dikasih *doorprize* akhirnya muncul. Nah sekarang itu yang harus kita perhatikan pasca-NKJP. Setelah mengikuti metode kontrasepsi jangka panjang, ternyata 1 tahun hamil. Lah, ini yang dituntut, ini, kan, “Bu, tapi saya sudah pakai kontrasepsi, kok hamil, bagaimana ini?” Nah, ini yang sebenarnya Pak kalau di daerah yang menjadi sebuah kenyataan banyak. Loh yang tadi ditanyakan, “Bapaknya sudah?” “Bapak saya, oh, suami saya sudah, ya mohon maaf, sudah mengikuti. Juga mengikuti tanggal, ya, mengikuti macam-macam, tapi hamil,” nah ini yang terjadi. Asuransinya apa, tanggung jawabannya ke siapa.

Prinsipnya, Pak Menteri, *panjenengan* sudah pasukan yang di bawah sudah bagus, Pak, sudah bagus. Mulai dari program-program GATI, suami dan macam-macam, banyak program itu jalan, jalan. Tinggal Bapak habis koordinasi seperti tadi disampaikan bahwa Kementerian BKKBN harus memberikan stimulus kepada kabupaten/kota agar kabupaten/kota ikut mendampingi dan itu masuk di APBD pendampingan terhadap program *stunting*. Bila perlu Pak Menteri mengeluarkan SK Menteri kepada bupati, wali kota, provinsi untuk dengan syarat harus mendampingi anggaran.

Yang terakhir, Pak, ada ADD dana desa. Dana desa ini juga perlu regulasi agar kepala desa ikut mendampingi dalam proses penanggulangan *stunting* melalui posyandu. Melalui posyandu, dana seperti dulu ada, apa namanya,

Program PMTAS, makanan tambahan, PMT atau PMKAS, ya. Itu, itu kan, dulu dari desa. Nah, itulah yang dimasukkan.

Saya kira, itu Pak Menteri.

*Matur nuwun.* Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

*Walaikumsalam,*

Terima kasih, Pak Heru.

Silakan, Bu Teti Rohatiningsih.

Bersiap, Pak Edy Wuryanto.

**F-P. GOLKAR (TETI ROHATININGSIH, S.Sos):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IX yang saya hormati,  
Pak Menteri beserta Jajaran yang saya hormati.**

Kalau saya, sih, *nambahi* saja, Pak Menteri. Kalau paparan sudah bagus banget, lah, ini. Dan memang capaian kita memang ke depan, sesuai dengan cita-cita atau visi-misinya Pak Menteri adalah strategi nasional Program Keluarga Berencana maksimal dilaksanakan di lapangan sehingga masyarakat kita, Generasi Emas 2045 itu tercapai dengan baik.

Yang selama ini, Pak Menteri, sebetulnya sudah ada kegiatan di desa itu Kampung KB, Pak Menteri, yang selama ini masih hidup enggak, mati enggak, loh, Pak Menteri. Padahal itu luar biasa, kegiatan Kampung KB itu di situ sudah tercakup ada penanganan *stunting*, ada PIK R, ada GenRe, ada keterlibatan karang taruna, infrastruktur. Itu dulu didanai dari dana desa 20%, Pak, 20%. Jadi 40% untuk infrastruktur, 20% untuk ketahanan pangan, 20 untuk kampung KB, sisanya untuk kegiatan-kegiatan administrasi di lapangan.

Itu tinggal dikuatkan lagi saja, Pak. Nanti kerja sama dengan kabupaten/kota. Nah nanti di sini PLKB berperan di kabupaten/kota, nanti dengan, mungkin Pak Menteri dengan ratas dengan Pak Menteri Dalam Negeri, mungkin

dengan menteri terkait untuk dikuatkan lagi kampung KB yang ada. Ini bagus sekali, Pak, sebetulnya. Tinggal, apa ya, pelaksanaan di lapangan. Nanti kalau ini sudah tercapai dengan baik, dengan ada dana.

Tadi, kan, Bu Eko (suara tidak jelas) sebaik apa pun program, kalau kader-kader kita di lapangan yang melaporkan hanya *menulis-nulis* saja, enggak ada (suara tidak jelas) dan lain-lain, pasti laporannya juga tersendat. Nah, ini dengan adanya dana DD 20%, Pak, dulu, tuh, kampung KB berjalan dengan baik. *Alhamdulillah*, *stunting* juga tertangani, derajat kesehatan masyarakat di lapangan juga tertangani, *stunting* juga menurun. Selain nanti ada bantuan dari kementerian, mungkin dari provinsi dan kabupaten/kota untuk ekspos di lapangan.

Itu, Pak, mungkin penguatannya itu saja sehingga mudah-mudahan nanti kader-kader kita di lapangan dengan ada DD yang 20% itu, eh 20% dari dana DD, bisa semangat lagi untuk proyek strategi nasional Program Bangga Kencana akan tercapai dengan maksimal.

Itu, Bu, terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

*Walaikumsalam.*

Terima kasih.

Pak Edy Wuryanto, silakan.

Bersiap, Pak Ahmad Safei.

**F-PDI PERJUANGAN (Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP.,M.Kep):**

Terima kasih, Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat pagi,  
Salam sejahtera untuk kita semua.

**Ketua, Anggota yang saya hormati,  
Pak Menteri, dan seluruh jajaran yang saya hormati.**

Saya ada tiga, Pak. Yang pertama, soal *stunting*. Pak Menteri masih membutuhkan Perpres 72 Tahun 2021 apa *ndak*, sih? Ini pertanyaan siapa ini, Pak Menteri, ini. Masih butuh apa tidak? Karena ini sudah 6 bulan, Pak. Menurut saya perencanaan yang baik itu, ya, di 100 hari kepemimpinan awal itu. Karena kalau Bapak masih menunggu Bappenas, Bapak akan ambigu untuk membuat perencanaan secara holistik tentang pemenuhan *stunting*. Mengapa Perpres 72 dulu dibuat? Kan posisi masih Badan BKKBN. Nah, sekarang posisi Bapak sebagai Menteri, soalnya. Ini harus betul-betul di-*clear*-kan karena dari perpres itu melibatkan lintas sektoral yang demikian banyak dan pasti itu menyangkut politik anggaran. Jadi, Pak Menteri mohon di-*clear*-kan dulu ini. Karena kalau saya melihat, paparan Pak Menteri ini meskipun teman-teman mengatakan bagus, itu belum mencerminkan Perpres 72 Tahun 2021. Itu yang pertama, Pak.

Yang kedua, lalu saya mau *review* tentang *stunting*, Pak. Awalnya 27%, lalu 24%. Lalu Pak Menteri tadi mengatakan Menkes baru kira-kira 18,8%. Target Bapak masih di angka 14,2%. 2025, 2045 5%, berarti kan ada penurunan yang gradual dari seluruh target *stunting*. Mengapa ini penting, Pak Menteri, *stunting* itu *golden time*-nya 1.000 hari kehidupan pertama. Itu *golden time*. Karena kalau lewat itu, tulang tengkorak anak itu sudah menutup, pertumbuhan otaknya enggak bisa tambah lagi. Artinya kecerdasan anak itu betul-betul di 1.000 hari kehidupan pertama itu. Kalau anak ini mengalami malnutrisi maka gangguan kecerdasannya itu permanen, Pak.

Jadi, apa pun faktor predisposisinya, faktor *presivitas*-nya tetap malnutrisi, Pak, ini *core*-nya di situ. Maka di banyak negara, *stunting* itu pasti berhubungan dengan persoalan ekonomi. Di mana tingkat ekonominya rendah, angka *stunting*-nya tinggi. Di mana negara itu tingkat ekonominya baik, itu *stunting*-nya pasti turun. Nah, karena itu, ini persoalan kompleks, Pak.

Saya kaitkan dengan pertanyaan Bu Irma tadi. Apa hubungannya dengan MBG, Pak? Dulu, Pak, itu kesulitan kalau, kalau kita mau melakukan intervensi spesifik. Kita pernah pakai roti, yang makan tamu yang hadir. Kita kasih duit, duitnya dipakai orang tuanya beli rokok. Kita upayakan dengan protein hewani di lokal, ternyata juga enggak efektif.

Saya sebetulnya sangat setuju sekali SPPG dapur ini sebagai pintu masuk untuk intervensi spesifik makanan bergizi bagi Keluarga Risiko *Stunting*. Hanya persoalannya, sekarang, kan, soal rebutan target sasaran. Kenapa Bapak enggak merebut target sasarannya digunakan fokus untuk intervensi *stunting*, Pak? Karena soal rebutan, Pak. Kalau kita evaluasi misalnya, sekarang, kan, banyak makanan yang diberikan itu sisa, toh, Pak. Bahkan sisa banyak itu.

Saya beberapa kali kunjungan ke SPPG itu enggak semuanya dimakan, Pak. Lah orang Jakarta biasa makan di Starbucks, disuruh makan seperti itu enggak dimakan. Ini *eman* banget, loh, Pak. Daripada banyak yang tidak mencapai target sasaran, digeser pada orang miskin yang target sarasannya adalah menurunkan strategi. Nah, ini soal merebut, Pak.

Jadi, saya berharap Pak Menteri mampu meyakinkan Bappenas, Menkeu dan BGN, dan lain-lain agar uang negara itu betul-betul efisien, efektif, menuju pada pokok persoalan. Karena *stunting* itu apa pun faktor pendukungnya adalah nutrisi. Bapak juga masih di situ ada intervensi sensitif dan intervensi spesifik, pada periode yang lalu, Pak.

Mohon izin, *nangani stunting muter-muter*, Pak. Duitnya banyak habis di pinggir jalan, Pak. Yang sampai ke target sasaran kecil karena terlalu banyak intervensi spesifik, *sorry*, intervensi sensitif. Padahal *stunting* itu, Pak, awalnya mengapa BKKBN itu diberi tanggung jawab ini? Karena *stunting* itu akan selesai kalau ada di keluarga.

Jadi, keluarga harus paham betul persoalan *stunting*. Dia tahu bagaimana cara mengatasinya dan dia tahu bagaimana menggunakan *resources* yang dia miliki untuk mengatasi *stunting*. Jadi, intinya ada kemandirian keluarga di dalam melihat masalah *stunting* ini. Itu sebetulnya mengapa dulu diberikan kepada BKKBN, yang menjadi subjek. BKKBN, kan, keluarga, pembangunan keluarga. Karena itu saya masih meyakini bahwa *stunting* ini memang cocok di BKKBN, tetapi bagaimana Bapak mengelaborasi ini sehingga menjadi satu orkestra yang intinya ada kemandirian keluarga di dalam menangani *stunting*. *Ndak* mungkin, Pak, *stunting* itu diselesaikan oleh pemerintah tanpa ada kemandirian keluarga. Nah, ini tugas Bapak, tuh.

Yang terakhir, soal kemarin itu ada audiensi mahasiswa UI yang hubungannya dengan generasi remaja. Ternyata *free sex* itu banyak juga di SMP, SMA. Lalu saya kaitkan dengan pernikahan dini yang tinggi. Penyebab pernikahan dini tinggi itu karena kecelakaan, hamil duluan, Pak. Terus kemudian geger ketika bahas Undang-Undang Kesehatan, dulu ketika kita bicara tentang kontrasepsi pada remaja, itu publik hantamannya kuat karena kontrasepsi masih dianggap tabu.

Padahal kemarin siapa yang di grup Komisi IX, Pak Sihar, ya, anggota parlemen atau mana yang, apa itu, promosi tentang kondom sebagai salah satu kontrasepsi, Pak Sihar kalau enggak salah itu. Di banyak negara, kondom itu bagian dari strategi kontrasepsi, Pak, tapi di Indonesia, kalau kemudian anak-anak sekarang ini tabu soal kontrasepsi, ini pasti akan memunculkan kecelakaan lalu pernikahan di dunia tinggi.

Nah, tentu Bapak harus punya strategi bagaimana *campaign* alat, bukan alat, ya, nanti salah persepsi. *Campaign* kontrasepsi bagi anak remaja. Kalau kita kasih nanti dikira melegalkan, kalau enggak dikasih, kecelakaan. Pernikahan dini yang tinggi dan pernikahan dini itu mendukung *stunting*. Saya kira itu kritik saya, Pak, tapi apa pun Bapak sudah bekerja keras. Selamat untuk melanjutkan tugas berat di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

*Walaikumsalam.*

Terima kasih, Pak Edy.

Pak Ahmad Safei, silakan.

Bersiap, Ibu Lucy.

**F-PDI PERJUANGAN (H. AHMAD SAFEI, S.H., M.H.):**

Baik, *makasih*, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Selamat pagi,

Salam sejahtera untuk kita semuanya,

*Om swastyastu,*

*Namo buddhaya.*

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX yang saya hormati, Pak Menteri, Bu Wamen, seluruh jajaran.**

*Alhamdulillah* hari ini kita bisa ketemu. Saya kira, Pak Menteri, bahwa teman-teman di lapangan ini sudah banyak berbuat terkait dengan bagaimana menyukseskan program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan khususnya di bidang *stunting* ini. Namun, saya rasa memang masih banyak juga yang perlu dibenahi, utamanya di internal kementerian ini sendiri karena saya melihat bahwa kalau kita sampaikan tadi paparan, saya kira luar biasa, tapi memang banyak juga yang perlu kita. Karena sampai dengan hari ini,

utamanya di struktur, saya masih melihat, saya nondaerah, Pak, di struktur memang sepertinya kementerian ini tidak sampai ke, ke daerah.

Tadi yang disampaikan Ibu Irma, disampaikan Bu, Pak Heru, juga seperti itu bahwa memang ini harus dibangun. Kebersamaan dibangun mungkin konversinya diperbanyak atau seperti apa, jangan kemudian. Karena yang saya *pahami* bahwa keberadaan kementerian ini baru sampai ke provinsi, Pak, di daerah enggak ada itu, itu cuma klaim Bapak itu mengatakan bahwa di daerah itu yang tadi ada setiap seribu orang ini, ini semua pegawai ASN pemerintah daerah, loh, ya, bukan pegawainya Bapak. Dan bahkan itu sebagian besar juga yang tadinya itu, apa, itu juga dahulunya, itu juga dahulunya ada pegawai pemerintah daerah yang kemudian karena ada keppres kemudian dialihkan menjadi penyuluh di lapangan yang menjadi pegawai, kemudian menjadi pegawai Bapak.

Nah, hal-hal yang begini saya kira yang perlu kita komunikasikan dengan baik karena terus terang di daerah juga ini para bupati, wali kota lagi sementara pusing ini, Bapak. Bagaimana menyusun ini kepegawaiannya karena begitu kita *pahami* semua bahwa begitu sulitnya sekarang daerah mendapat formasi untuk ASN itu. Nah, sekarang Bapak mau mengambil lagi yang sudah ada. Ini memang jadinya nanti energi kita susah di orang.

Nah, ini saya kira juga. Saya kira kalau memang ini menjadi kebutuhan, saya kira tinggal kementerian ini mengajukan formasi ke Menpan agar supaya diadakan pengangkatan pegawai negeri sipil untuk digunakan oleh Kementerian Kependudukan ini. Jangan merekrut apa yang sudah ada di, di daerah, kemudian dialihkan seperti itu. Yang kita harus pikirkan, daerah juga bagaimana kalau diambil ini? Ya daerah lagi, bagaimana lagi daerahnya. Nah, ini saya kira, Bapak/Ibu.

Kemudian yang berikutnya, saya berharap bahwa kementerian ini menjadi eksekutor bukan hanya menjadi pembuat peta jalan. Menunjukkan bahwa kalau dilakukan begini ini jalan keluarnya bukan itu. Tapi saya kira, ini menjadi eksekutor, ya. Saya kira kita punya pengalaman BKKBN di masa lalu, ya, saya kira sangat bagus sekali, Pak, perjalanannya, tapi kalau ini, kan, seperti hanya membuat peta jalan. Menunjukkan jalannya untuk kita menuju bagaimana mengurangi *stunting*, ini jalannya. Saya kira bukan itu yang kita harapkan, tapi kita berharap bahwa memang menjadi eksekutor. Kalau kita sudah tunjukkan “ini jalannya seperti ini,” kita eksekutor, lakukan ini seperti begini. Nah, kalau itu yang kita lakukan, saya kira, nah itu yang diharapkan oleh teman-teman di bawah.

Saya *pahami* kondisi itu karena saya juga pernah memimpin daerah, Pak. Ya, jadi saya *pahami* betul bahwa kondisi berkaitan di bawah seperti begitu. Tapi saya kira seperti yang Bapak kemukakan tadi bahwa memang teman-teman di

bawah ini, baik penyuluh maupun kader, ya luar biasa pergerakannya, walaupun dengan kondisi seperti tadi katakan, tidak ada yang mau bekerja orang dengan honor 320.000, Pak. Enggak ada itu. Ceritanya mau hidup saja enggak cukup, ya. Ya, tapi *alhamdulillah* semua bisa, ya, apa program-program Bapak, apa program kementerian ini bisa dilaksanakan di tingkat bawah. Ini, kan, semangat, tapi kemudian kalau dibiarkan terus-menerus begini juga, ya, tidak menutup kemungkinan suatu ketika ada program lain ini bisa pindah.

Nah, ini yang kita harapkan dan kita berharap seperti begitu sehingga memang target-target *stunting* sampai dengan 2029 ini bisa kita capai, tapi tentu, ya, perlu, ya, kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah khususnya karena ini eksekutornya seperti daerah ini, bukan kementeriannya, tapi seperti daerah. Karena kalau saya melihat perusahaan, saya lihat saya juga ke dapil baru-baru ini sempat juga ketemu dengan teman-teman yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan BKKBN itu, semua seperti begitu. Mulai daripada Kadis sampai semua pejabat struktur, ya, semua itu masih, ya, organ pemerintah daerah.

Bagaimana Bapak memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan program ini dengan baik? Sementara itu bukan programnya Bapak. Kalau memang baik-baik kalau kemudian bupatinya sejalan dengan program ini. Kalau tidak, bilang, "Eh, yang kamu dengar saya atau kepala, kepala, apa, BKKBN-nya?" Ya, tentu dia pasti lebih *memilih* bupatinya. Nah, ini yang kadang kala yang kebal.

Nah, ini saya kira yang harus tadi disampaikan Pak Heru, kita duduk bersama disampaikan seperti apa ini program agar semua kita bisa memahami betul-betul, Pak. Pak Gubernur, Pak Bupati, memahami bahwa ini prosedur kita bersama, tinggal, tapi kita tetap berharap bahwa, ya, sekali lagi kementerian ini bukan hanya sebagai penunjuk peta jalan, tapi sebagai eksekutor, Pak, ya. Jadi, memang kalau hanya di sekitar teori, kita sulit itu menerjemahkan seperti apa di, di, di daerah.

Saya kira, itu sekadar masukkan dari saya, Pak.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

*Walaikumsalam.*

Terima kasih, Pak Ahmad Safei.

Silakan, Ibu Lucy.

**F-P. DEMOKRAT (Dra. LUCY KURNIASARI):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmannirrahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang saya hormati dan saya banggakan Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi IX dan Pak Menteri, Ibu Menteri, beserta seluruh jajaran dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.**

Saya tadi mendengarkan paparan Pak Menteri, setuju. Jadi, pemerintah daerah ini memiliki peran strategis. Jadi, tadi sudah banyak disampaikan. Jadi perlu kerja sama antara kementerian Bapak dengan instansi dan lembaga lainnya, kementerian dan lembaga lainnya, serta pemerintah daerah.

Di dapil saya, Pak Menteri, sekarang ini sudah kampanyenya *zero stunting*. Dapil saya Surabaya, sama dengan Bu Indah Kurnia. Juara penanganan *stunting* di Kota Surabaya, 1,7% per hari ini. Jadi, saya melihat inovasi yang luar biasa yang sudah dilakukan pemerintah daerah. Jadi, Pak Wali, Wali Kotanya ini turun langsung bersama Ibu Wali Kota untuk inovasi yang dilakukan per hari ini di setiap RW sudah ada satu nakes, R1NI, namanya Ibu Wali Kota, Ibu Rini. Jadi, programnya R1NI dan berjalan dengan baik.

Lalu kemudian dikolaborasikan dengan tim pendamping keluarga yang luar biasa hebatnya. Ketika kami turun ke lapangan, kita tidak serta-merta percaya dengan angka 1,7% prevalensi *stunting* itu. Tetapi ketika ke posyandu, kami menanyakan di kader posyandu, apakah ada ibu hamil risiko tinggi? Ternyata banyak yang mengatakan sudah *zero*. Jadi, ini saya percaya dengan data ini. Pada saat di-*publish* 1,7, tentunya kita tidak langsung percaya, tetapi setelah dicek di Kota Surabaya akurat dengan hasil surveinya.

Lalu kemudian terkait dengan penguatan Program Keluarga Berencana. Saya melihat tadi di Kompas ada Pak Menteri juga, apresiasi dulu kepada Gubernur Jawa Barat, nih, yang *mempersyaratkan* KB pria untuk penerima bantuan sosial. Ini luar biasa, inovasi-inovasi yang luar biasa. Saya sendiri juga mendukung KB pria, metode operasi pria. Karena selama ini perempuan sudah menstruasi, lalu kemudian hamil, melahirkan, menyusui 6 bulan sampai 2 tahun, mendampingi keluarga, belum lagi kalau perempuannya bekerja. Nah, kalau ini

disosialisasikan dengan benar, targetnya untuk di 2026 ini nanti, ke depan, metode operasi pria ini bisa didukung dengan anggaran juga karena kabarnya mahal, ya.

Lalu kemudian ketika saya sosialisasi juga demikian. Saya menyampaikan di acara tersebut, mungkin di sini ada Pak Tebo, ya. Kami sering waktu Bapak di Jawa Timur menghadihkan kalau selama ini ada hadiah 400.000 untuk menggantikan tidak bekerja 1 hari, kami menambahkan 500.000, tapi harus hari ini, dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Harus punya anak dua, lalu kemudian harus ada izin istri dan sebagainya. Nah, ini yang kita perlu sosialisasi dan perlu juga testimoni, testimoni dari Bapak-bapak yang sudah melakukan MOP. Nah, ini perlu kita masukkan di media sosial sehingga biasanya anak-anak remaja sekarang ini banyak melihat dari media sosial.

Lalu yang terakhir, tadi Bapak Menteri mengatakan bahwa telah terbentuk pusat informasi dan konseling remaja. Ada 35.414. Nah, saya ingin tahu data di Surabaya berapa, ya, Pak? Karena saya sering juga turun, kok, belum terbentuk PIK Remaja-nya. Kalau Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, itu sudah terbentuk.

Lalu kemudian yang tadi dikatakan Bu Teti terkait dengan kampung KB, itu betul, Pak. Karena dulu terbentuk hanya satu kabupaten/kota hanya ada satu atau dua, kemudian berkembang setiap kecamatan satu. Lalu kemudian berkembang lagi di Sidoarjo itu setiap kecamatan dua, di Surabaya juga demikian. Jadi, ini perlu kita, apa, galakkan lagi karena kalau terbentuk kampung KB sudah dengan sendirinya terbentuk PIC remaja, ada Bina Keluarga Lansia, ada Bina Keluarga Balita.

Demikian dari saya, Pimpinan. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

*Walaikumsalam.*

Terima kasih, Bu Lucy.

Ini ada tambahan Ibu Sri Meliyana, silakan.

**F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):**

Terima kasih, Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya sayangi dan banggakan, Pak Menteri Kemendukbangga, saya ikut Pak Nurhadi tadi, Kemendukbangga, ya, Pak, singkatannya, Beserta Wamen, beserta seluruh Jajaran Kementerian yang hadir pada hari ini yang saya hormati.**

Mengikuti pembicaraan kita hari ini, Pak Menteri, saya juga masih mendengar keluhan masa lalu yang disebutkan teman-teman saya tadi. Betapa merananya PKB, betapa rendahnya, apa, honor buat mereka. Bahkan kata Pak, bapak mantan bupati kita, enggak ada itu PKB, yang ada, tuh, ASN dan lain-lain. Sekacau itu, Pak, masa lalu, tapi saya harapkan dengan menjadi kementerian dan dengan membuat paparan seperti ini, mudah-mudahan itu sudah dianalisis, Pak, sehingga terasa bedanya. Terasa waktu kami masih di badan dengan sekarang kita berada di kementerian, seluruh aspek harus diikutsertakan, Pak.

Di tempat saya dulu satu PKB, PLKB itu ibu-ibu masih muda menangani dua kecamatan, Pak. Itu waktu saya baru masuk, tapi kemudian terus disosialisasikan betapa pentingnya dan kemudian *stunting* menjadi primadona waktu itu maka sekarang mereka lapor satu PKB itu sudah satu kecamatan. Jadi, dia enggak beredar di dua kecamatan. Satu kecamatan itu di tempat kami 20-an desa, Pak. Bayangkan dengan satu motor yang sudah makin hari makin tua dia bekerja di dua kecamatan, tapi saya harap yang keluhan tadi itu memang menjadi prioritas juga untuk diperbaiki.

Nah, kemudian persoalan *stunting* saat ini, saya rasa kalau baca yang saat ini, nih, memang cuma pergeseran dari persoalan masa lalu, Pak. Ada nutrisi, ada akses air bersih, ada edukasi, pencegahan dan penanganan, ada jamban sehat, dan rumah layak huni. Yang kita bisa lakukan, Kemendukbangga bisa lakukan, edukasi, pencegahan, dan penanganan. Yang tiga lainnya itu, Pak, pihak lain yang harus ikut serta. Sepanjang itu tidak ikut serta maka *stunting* ini tetap hantu, Pak.

Kalau mereka tidak, kemarin kita bilang yang hore-hore itu BKKBN. Enggak punya kekuatan untuk meng-*hore-hore*-in yang lain. Nah, sekarang kita kementerian saya harap kekuatan itu bisa menjadi kekuatan yang sebenarnya, Pak, untuk membuat nutrisi, akses air bersih, jamban sehat, dan rumah layak huni itu benar-benar menjadi bagian dari pencegahan *stunting*.

Kemudian ke persen prevalensi *stunting* 2019 ke 2020 turun 7, 0,78%. 2020 ke 2021 turun 2,52, selanjutnya turun 2,8, 2022 ke 2023 hanya turun 0,1. Ini angka ini, Pak, membuat kami kalau kunjungan kerja dulu berantem-berantem, Pak, dengan kepala daerah, otot-ototan. Kata NTT yang waktu itu menurut data

masih 30%, kata Bupati Labuan Bajo waktu itu kami datang, yang belum dilakukan, tuh, gubernur menempeleng bupati katanya. Saking ini semua harus dilakukan dan angka 30% yang kita berikan ke mereka itu mereka tolak, Pak. Enggak mungkin kami tahu *by name by address* sehingga sampai sekarang masih terjadi perdebatan tentang bagaimana kita meng-*announce* prevalensi *stunting*. Apakah e-PPGBM, apakah SSI atau SSGI? Mohon ini juga menjadi konsentrasi, Pak.

Kita enggak boleh, enggak boleh juga, apa, apa ya, mengecilkan hati orang yang sudah bekerja mati-matian ternyata mereka cuma dikasih nilai berdasarkan survei. Padahal secara realistis mereka sudah bekerja. Nah, itu. Dan angka ini adalah angka dinamis. Bukan kalau “Oh, sudah 21%,” maka aman di situ. Sepanjang bayi-bayi masih lahir, sepanjang, apa, umur 2 tahun masih di, dimonitor, maka *stunting* ini bergerak di urusan itu, Pak, sehingga ke daerah-daerah ini harus, harus terus, terus digaungkan. Ini bukan angka diam.

Kalau Anda sudah 7% maka tidak 7% lagi kalau Anda lengah dan lain-lain. Nah, selain itu, tadi Bapak sampaikan bahwa untuk percepatan penurunan *stunting*, kita perlu revisi Perpres 72. Tadi kata Pak Edy, apa benar kita masih perlu Perpres tersebut? Tapi menurut kami, jika pun itu akan direvisi, mohon dijelaskan secara konkret, Pak. Aspek-aspek kebijakan dan terobosan apa saja yang akan menjadi poin krusial di Perpres 72 sehingga ada daya ungkit terhadap kecepatan *stunting*.

Kemudian pada halaman selanjutnya, pembentukan tim pengendali GENTING tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kesimpulan yang Bapak buat, persentase pembentukan TP GENTING provinsi sebesar 92,11% karena masih ada *cover-cover* di situ. Jadi, provinsi cepat melaksanakan GENTING ini, tapi di kabupaten hanya 51,17% yang baru terbentuk. Saya tadi dengar dari Pak mantan bupati juga, kabupaten-kabupaten itu dinasnyanya lebih ikut bupati, Pak, daripada kita.

Nah, kami ingin tahu bagaimana langkah-langkah Kemendukbangga mensosialisasikan yang sudah Bapak buat di peran strategis pemerintah daerah dalam pelaksanaan, dalam pelaksanaan Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*, ini bagus banget satu halaman. Tapi kalau tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah maka ini aturan tinggal aturan, rencana tinggal rencana. Kami ingin tahu bagaimana cara Kemendukbangga sampai ke kabupaten dan membuat mereka sadar bahwa ini rencana nasional, bukan rencana satu pihak semata sehingga boleh dilaksanakan boleh tidak. Kami ingin ada pemahaman dari pemerintah daerah tentang peran strategis mereka yang sudah Bapak jabarkan di halaman, di halamannya karena tidak ada halaman, Pak.

Yang terakhir mungkin kami ingin ke indikator peta jalan kependudukan dan pembangunan keluarga tahun 2025. Ini cuma, cuma kualitatif, enggak ada kuantitatifnya, Pak, kami ingin tahu itu. Seharusnya beberapa hal yang, yang sudah ada indikatornya kita sampaikan di sini. Contohnya, Pak, sasaran satu pengendalian kuantitas penduduk. Ada *total fertility rate*, ada *age-specific*, ada proporsi kebutuhan KB. Pak, kalau rapat sebelum ini, bahwa penghematan kita itu juga terarah untuk alat-alat KB, Pak. Nah, bagaimana itu hubungannya dengan, apa istilahnya, kok jadi lupa, Pak Charles. Istilah penghematan kita itu.

Efisiensi, terima kasih kawan-kawan.

Karena Pak Charles ada berhadapan sama saya dan sedang tersenyum. Karena Ibu baru menghadap ke sini.

Terima kasih, Bu Indah.

Efisiensi. Jangan sampai itu ke alkon, Pak. Kalau itu ke alkon, apa efeknya dengan sasaran pengendalian kuantitas penduduk yang Bapak paparkan pada indikator peta jalan dan lain-lain. Ada sasaran-sasaran kita sampai tahun 2030 akan begini, tahun sekian akan begini. Nah, kami minta indikator ini yang sudah ada secara makro dinyatakan dalam, dalam indikator peta jalan kita sehingga kita tahu mana yang berapa besar kebutuhan, berapa, berapa jauh sasaran dan lain-lain untuk menyukseskan kependudukan kita dan pembangunan keluarga tahun 2025 sampai 2029.

Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Selamat bekerja Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dulu setiap kali kami kunjungan kerja ke daerah-daerah, saya memerlukan pesan khusus ke setiap kepala daerah, "Tolong BKKBN karena mereka anak bungsu kami dalam anggaran di Komisi IX". Nah, mudah-mudahan setelah menjadi kementerian ini, saya tidak, tetap menitipkan, tapi tidak dengan kata-kata seperti itu lagi, Pak. Kita berkekuatan sama dengan kementerian-kementerian lainnya, *insya Allah*.

Terima kasih, Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih, Ibu Sri Meliyana.

Ini ternyata ada dua tambahan lagi.

Silakan, Ibu Indah Kurnia.

Bersiap, Bu Neng Eem.

**F-PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIA, S.E.,M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Pak Charles, Pak Yahya, Bu Puti, Bapak/Ibu Anggota Komisi IX yang saya cintai dan tentu saja Bapak Wihaji beserta seluruh jajaran.**

Terima kasih untuk pemaparan yang mungkin tadi tidak saya sempat ikuti, tetapi saya sudah membaca cepat, Pak, bahan presentasi. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Adinda saya, Lucy, yang dari sekolah juga adik kelas saya dan sekarang kita bertemu, kita satu dapil. Kita sepakat untuk sama-sama mengelola kota Surabaya, itu dapil kita, dengan secara bersinergi dan berkolaborasi. Tapi saya membaca cepat di sini dan ingin memberikan masukan kepada Bapak, khususnya tentang keberhasilan kita menangani *stunting*.

*Stunting* itu adalah satu kata yang memang akhir-akhir ini akrab, tetapi dalam pelaksanaannya, *stunting* itu sendiri sesuai dengan disampaikan di dalam, halamannya tidak ada, ini tentang isu strategis. Itu masuk dari nomor satu ini yang paling penting adalah pemahaman masyarakat terkait pencegahan *stunting* dari hulu itu masih rendah. Nah, menurut saya, Pak, keberhasilan kita saat ini tadi disampaikan oleh Ibu Meli yang sampai lupa dengan istilah itu gara-gara enggak fokus dengan penampilan Pak Charles yang hari ini menurut saya juga lebih *fresh*, lebih muda, lebih keren. Itu mungkin, sih, agak-agak *salfok*. Iya.

Nah, kalau kita bicara tentang Bapak sudah memaparkan tentang di sini ada *baseline*, kemudian ada target. Nah, targetnya Bapak, kan, untuk tahun 2029 sesuai dalam RPJMN, target akhir mencapai 14,2. Sementara saat ini kondisinya saya baru melihat tahun 2023 21,50 berarti 7% kira-kira, Pak. Nah, sekarang kita pada kondisi yang efisiensi tadi menurut Bu Meli. Menurut saya efisiensi itu kita bacanya atau kita sikapnya sebagai tantangan saja, Pak.

Nah, biasanya secara manusiawi, kita, tuh, kalau ada tantangan atau kepepet, kepepet itu artinya sudah mentok, *ndak* bisa *ngapa-ngapain*, itu biasanya secara naluri manusia itu lebih kreatif karena kepepet. Lebih cerdas, lebih kreatif, lebih hemat, lebih hati-hati, enggak mau mengeluarkan uang kalau enggak perlu. Nah, mungkin itu adalah salah satu cara yang akan kita gunakan untuk *mengkreativitas* diri kita agar anggaran itu diguna-guna, eh, digunakan, bukan *diguna-gunain*,

digunakan sebesar-besarnya untuk keberhasilan program kita. Satu rupiah itu kita perhitungkan benar. Itu dampak positif dari efisiensi.

Nah, mungkin dari *baseline*, kemudian versus target, Bapak *breakdown* menurut saya sesuai dengan, saya tadi tidak mendengarkan presentasi, apakah evaluasi dari isu strategis *one, two, three, four, five, six* ini apakah sudah di-*breakdown*, disesuaikan dengan anggaran yang ada? Saya enggak tahu BKKBN itu anggarannya berapa, Pak? Karena selama ini menurut saya seluruh program, seluruh target itu tentu *depend on* juga anggaran. Nah, anggaran yang efisiensi ini, ya kita sikapi dengan cermat, dengan cerdas agar sebesar-besarnya satu rupiah itu digunakan agar berdampak.

Nah, kita kalau garap nomor satu saja, Pak, misalnya, Pak, pemahaman yang rendah tadi kita tingkatkan, tentu itu akan sangat membantu. Caranya bagaimana? Itu saya serahkan kepada Bapak, tetapi kalau disampaikan oleh Ibu Lucy tadi di Surabaya, saya tambahkan, Pak, Surabaya itu selain tadi ada Rini ya R1NI tadi, terus kemudian wali kota kami itu juga akrab dengan para, khususnya pelaku usaha yang bisa membantu, Pak. Justru itu, kan, saya selalu menekankan bahwa untuk mencapai target itu salah satu yang bisa membantu kita termasuk kemiskinan, pengangguran, penyempitan atau pemendekan *gini ratio* yang masih lebar.

Semua itu tentu tak lepas dari bantuan kalau APBN, APBD, tidak mampu, itu dari pelaku usaha. Maka salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana membangun situasi atau iklim usaha yang kondusif sehingga mereka bisa berkarya, mereka bisa merekrut karyawan, mereka bisa bekerja dan membayar pajak dan seterusnya. Itu adalah dampak atau efek domino dari iklim usaha yang kita jaga baik-baik. Nah, itu termasuk BKKBN termasuk di dalamnya. Untuk itu mungkin kalau di Surabaya tadi disampaikan oleh Bu Lucy ada R1NI dan seterusnya. Saya sampaikan, Pak, Surabaya itu juga dibantu oleh pengusaha, Pak, untuk *stunting* itu. Jadi, mereka dilibatkan oleh Mas Eri itu. Saya tahu betul itu kawan-kawan kami, kami sering ketemu dan kemudian dibebani. Jadi, satu mereka ada yang namanya Bakti Persatuan itu pengusaha senior semua, ya, termasuk konglomeratnya Jawa Timur, itu semua mengambil, Pak. Semacam kayak anak asuh, termasuk satu keluarga satu sarjana, itu Surabaya melakukan, begitu dan yang membantu mereka semua para pelaku usaha, tapi sebaliknya mereka juga dibantu dengan iklim usaha yang kondusif, perizinan yang tidak berbelit. Itu semua itu pasti ada dampaknya.

Jadi, kita, iya betul ekosistem dibangun berkolaborasi, bersinergi masing-masing saling membutuhkan. Kalau ada perizinan tidak dipersulit, mau buka usaha tidak dipersulit dan seterusnya itu saling. Maka kalau ada hubungan yang

harmonis seperti itu yang termasuk kepepet tadi itu efisiensi bisa dibantu dengan cara melibatkan mereka.

Di Surabaya itu, Pak, selain tadi itu *stunting* juga bagus, cuma 1,7, dia kontribusinya *stunting* sangat kecil untuk nasional berarti dia di bawah rata-rata nasional. Kemudian juga dia berusaha untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Jadi, satu pengusaha bisa bawa satu keluarga itu sarjana. Jadi, satu, satu keluarga satu sarjana itu programnya, mereka dilibatkan untuk ambil peran dalam hal itu.

Nah, mungkin masukan saya adalah bagaimana efisiensi itu disikapi sesuai dengan *baseline* yang Bapak sampaikan tadi menuju target Indonesia Emas itu di-*breakdown* dari Bapak sudah mengidentifikasi SWOT-nya sudah ada, tantangannya adalah pemahaman masyarakat, Pak. Itu saja kalau sudah ditingkatkan maka tadi istilah yang menurut Pak Edy dan Pak Sihar itu sebagian besar orang itu saru. Saru itu apa, ya? Mesum, enggak pantas untuk diucapkan. Itu menjadi sesuatu yang wajar karena itu, pertama kesehatan, kedua adalah bagaimana me-*minimize* kelahiran yang tidak diharapkan dan seterusnya. Jadi, anak-anak itu sejak dini diajarkan seperti itu. Pemahaman yang rendah, kemudian intervensi yang belum berfokus pada pencegahan dan masih berorientasi lebih banyak pada penanganan anak *stunting*.

Jadi, menurut saya betul sekali mulai dari dalam kandungan, bahkan mulai mereka sebelum menikah pun diberikan pengajaran yang jelas agar mereka tahu bahwa menikah itu bukan hanya cinta saja dasarnya, tetapi membangun keluarga yang berkualitas. Termasuk menghadirkan anak-anak atau generasi untuk Indonesia yang berkualitas.

Demikian, Tuhan, anu, Bapak/Ibu sekalian, masukan dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan kelengkapan untuk pembahasan kita pada pagi dan siang hari ini.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

Terima kasih, Ibu Indah.

Selanjutnya, Ibu Neng Eem. Silakan.

**F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I.,M.M.):**

Terima kasih, Ibu Pimpinan.

**Pimpinan Komisi IX yang saya hormati dan yang saya banggakan,  
Seluruh Anggota Komisi IX,  
Bapak Menteri Wihaji beserta Jajaran.**

Saya ingin menyampaikan ini sebenarnya lebih penting daripada *stunting* karena ini terkait hak hidup yang paling mendasar dan ini kaitannya juga dengan kependudukan, Pak. Saya ingin bicara tentang nasib masyarakat adat, ya, kayak Suku Anak Dalam dan beberapa di seluruh wilayah negara kita. Karena mereka, satu pertama, nasibnya itu sering terlunta-lunta. Padahal mereka asli adalah orang Indonesia, tetapi sering mereka terusir dari tanahnya sendiri.

Kenapa mereka sering terusir? Tanah-tanahnya itu sering sekali kadang menjadi HGU dan lain sebagainya dan sehingga mereka, apa, nasibnya enggak jelas dan kenapa mereka tidak bisa mempertahankan? Karena mereka tidak bisa mendapatkan akses untuk diakui sebagai warga negara Indonesia. Tidak bisa mengakses untuk punya KTP. Kenapa dia tidak punya KTP? Karena tidak punya KK (Kartu Keluarga). Kenapa tidak bisa punya KK? Karena tidak punya surat nikah. Kenapa kemudian, akhirnya sampai seterusnya tidak punya, apa, yang surat kelahiran dan lain sebagainya. Begitu juga anak-anaknya akhirnya seperti itu. Sehingga ketika mereka sudah *berpuluhan* tahun tinggal di, di tempat yang mereka tinggal, itu tidak bisa mempertahankan haknya. Bahkan untuk punya rumah untuk mengklaim yang dia tempati saja itu tidak bisa.

Nah, saya, tuh, enggak tahu, ya, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga itu terus, apakah ada wewenang untuk mengintervensi itu? Agar mereka sebagai Bangsa Indonesia minimal diakui secara *formil* bahwa mereka adalah warga negara Indonesia, begitu. Karena, kan, itu hak konstitusi Bangsa Indonesia di antaranya itu. Pertama, diakui sebagai warga negara Indonesia sehingga nanti dia akan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, punya kewajiban dan lain sebagainya.

Ketika secara formalitas dia tidak punya itu, maka akhirnya dia, ya, tidak ada yang memperhatikan. Jangankan masalah *stunting*, masalah untuk hidupnya saja dia enggak jelas, terusir dan lain sebagainya. Ini kenapa, apa, saya bicara seperti itu karena sebenarnya banyak sekali beberapa yang mengadvokasi di antara anak suku dalam yang dari Jambi itu, mereka juga bahkan sering, apa, diburuk kayak, kayak bukan manusia oleh, apa, apa, untuk tidak berkeliaran di tempat HGU yang dulu itu adalah wilayahnya dia, begitu, seperti itu, bahkan ada yang tertembak dan lain sebagainya.

Akhirnya ketika tempat hidupnya menjadi perkebunan, dia menjadi terusir, terlunta-lunta, kemudian akhirnya ke masuk ke dalam wilayah kota, kadang

mencuri, misalkan sawit dan lain sebagainya karena dia biasanya hidupnya mungkin di hutan dengan memakan buah-buahan yang dari pohon-pohon tersebut. Akhirnya ketika keluar kota, akhirnya terjadilah kriminal, ingin makan dan sebagainya, tetapi ada yang diadvokasi, salah satu ada yang diadvokasi akhirnya dia bisa, bisa hidup, ada di, ditempatkan, terus kemudian anaknya juga ada sekolah. Tapi ketika dia misalkan walaupun pintar, ikut sekolah, ketika mau tamat itu tidak bisa punya ijazah karena, ya itu tadi, tidak punya, apa, surat lahir, tuh, apa, dan yang seperti itulah. Nah, nah itulah.

Jadi, maksud saya, tuh, apa peranan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk, khusus untuk masyarakat adat? Walaupun kita mungkin belum, ya. DPR, kan, mengajukan bagaimana ada RUU Masyarakat Hukum Adat. Itu memang belum, belum ada, begitu, kan, baru usulan, begitu, kan, tetapi saya kira nasib mereka itu tidak bisa menunggu. Minimal negara hadir untuk masyarakat adat tersebut agar mereka enggak kayak, kayak semacam diperlakukan kayak buronan. Mereka, tuh, diperlakukan kayak buronan, kayak bukan warga negara Indonesia, begitu, loh, seperti itu. Nah, ini saya kira ini negara wajib hadir, nih, untuk mereka ini, mereka asli suku Indonesia. Bahkan sebelum Indonesia merdeka itu mereka, tuh, sudah ada, seperti itu.

Nah, saya meminta agar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga hadir untuk mereka. Saya belum tahu, ya, melalui fasilitas apa dan lain sebagainya mungkin bisa koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kehutanan dan lain sebagainya, tetapi mohon ini di, apa, ya, dipertimbangkan. Ini hak konstitusi yang paling mendasar, begitu. Orang Indonesia, Bangsa Indonesia, tapi dia secara formalitas belum diakui sebagai warga negara Indonesia sehingga dia tidak bisa menuntut hak-haknya ketika dia tinggal di Indonesia, seperti itu. Mau keluar juga, kan, ya, begitu, enggak, enggak, enggak bisa, seperti itu. Mohon ini, Pak. Ini bicara tentang kemanusiaan, Pak, ya. Bicara tentang bagaimana memanusiakan manusia seperti itu.

Jadi, mohon ini mungkin dipertimbangkan. Bila perlu memang kalau memang harus ada regulasi dan lain sebagainya, tetapi mohon kita minta fasilitas kebijakan untuk agar negara hadir bisa menangani itu, ya.

Terima kasih.

*Wallahulmuwafiq ila aqwamithoriq,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

*Walaikumsalam.*

Terima kasih.

Dari Anggota cukup, ya, enggak ada lagi?

Selanjutnya kami persilakan dari Pimpinan, Pak Charles.

**F-PDI PERJUANGAN (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX):**

Ya, saya sedikit saja.

Terima kasih, Bu Ketua.

**Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IX, Pak Menteri, Ibu Wamen beserta Jajaran.**

**Bapak/Ibu.**

Kalau kita melihat perpres, Perpres 72, ya? Perpres tersebut memberikan penugasan kepada BKKBN yang hari ini menjadi Kemendukbangga, ya, kalau enggak salah. Kemendukbangga sebagai ketua, apa namanya, nih? Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*, ya, artinya menjadi lembaga yang ditugasi untuk menjadi koordinator percepatan penurunan angka *stunting*.

Nah, menjadi koordinator itu apa? Apakah koordinator itu menjalankan semuanya? Tentu tidak, kan? Koordinator adalah pihak yang harus bisa mengkoordinasi seluruh kementerian/lembaga yang bersama-sama harus bisa menurunkan angka *stunting* di Indonesia.

**Bapak/Ibu.**

Saya ingin kembali menggarisbawahi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lucy dan Ibu Indah Kurnia. Bagaimana Kota Surabaya berhasil menurunkan angka *stunting*. Kalau di catatan saya itu di tahun 2021 angkanya 28,9%, di tahun 2023 angka prevalensi *stunting* turun menjadi 1,6 atau 1,7%. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, Pak Menteri mungkin soal strategi harus disusun ulang, ya.

Karena Indonesia ini, kan, wilayah yang sangat beragam, baik dari sisi demografinya, dari sisi kepadatan antara kota, ya, dari sisi penduduk *urban* maupun penduduk pedesaan sehingga harus dibuat klaster, ya. Ambil saja contoh model keberhasilan di berbagai wilayah, misalkan Kota Surabaya. Apa strategi yang dilakukan sehingga Kota Surabaya bisa berhasil menurunkan angka *stunting* secara drastis.

Kebetulan kita Komisi IX pernah kunjungan ke Kota Surabaya. Saya enggak ingat persis, tetapi saya ingat dipaparkan oleh Pak Wali Kota, kurang lebih strateginya menggerakkan 48.000 kader kesehatan, menggunakan teknologi informasi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya.

Nah, selain Kota Surabaya, menurut catatan kami, beberapa kabupaten/kota juga bisa menurunkan angka *stunting* secara drastis. Di Bali misalnya, Kabupaten Badung menurunkan angka *stunting* dari 4,9% menjadi 2,2%. Buleleng di tahun 2022 angka *stunting*-nya 11%, kemudian bisa diturunkan menjadi 3,5%.

Nah, tipologi lokasi atau wilayah seperti ini dibuat menjadi satu klaster, lalu modelnya menjadi apa, ya? Strategi yang dibuat untuk, apa namanya, wilayah-wilayah dengan tipologi yang sama. Ini saran saya, Pak. Sehingga Bapak mungkin strategi nasionalnya umum saja, tetapi sebagai koordinator Bapak harus bisa *drive* kabupaten/kota dan provinsi untuk bisa menurunkan angka *stunting* sesuai dengan wilayahnya yang nanti Bapak siapkan strategi secara umum, ya, untuk bisa diterapkan.

Tetapi tentunya strategi saja tidak akan bisa berhasil tanpa *political will* dari kepala daerahnya. Tugas Bapak adalah membantu menyusun strategi dan *drive* agar wilayah tersebut atau pemerintah daerah tersebut mau menjalankan strategi itu. Nah, kalau memang nantinya kepala daerah tidak punya *political will*, ya, pasti nanti akan dihukum oleh rakyatnya dan tidak akan dipilih lagi dalam Pilkada yang selanjutnya, ya.

Jadi, pesan yang saya ingin titipkan adalah tolong buat strategi berdasarkan wilayah yang sudah berhasil menurunkan angka *stunting*. Dibuat klaster sesuai dengan tipologi wilayahnya dan nanti bisa diterapkan sesuai dengan wilayah yang berbeda. Ya, tentunya, Bapak/Ibu, kalau kita bicara penurunan angka *stunting*, nomor satu, ya pasti anggaran, dibutuhkan anggaran.

Ini kembali lagi saya ulang, nih, di, dari rapat yang sebelumnya. Kita sebetulnya prihatin, ya, dengan punya, Indonesia punya target Indonesia Emas di tahun 2045, dengan target besar menurunkan angka *stunting* menjadi 5% di tahun 2045, tetapi faktanya dengan adanya efisiensi anggaran Bapak dipotong kemarin 700 sekian miliar, ya pasti berat, ya. Oleh karena itu, kembali lagi, peran koordinasinya harus dikuatkan.

Bapak harus bisa menjadi manajer yang baik, ya, untuk bisa *manage* semua kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah untuk mau bergotong-royong bersama-sama menurunkan angka *stunting*. Kalau boleh jujur, nih,

Bapak/Ibu, menurut saya, kalau anggarannya MBG dipotong setengahnya saja untuk fokus, ya, membuat intervensi spesifik dan sensitif untuk penurunan angka *stunting*, tahun depan kita akan melihat angka *stunting* menurun secara drastis.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

Terima kasih, Pak Charles.

Silakan, Pak Yahya Zaini.

**F-P. GOLKAR (M.YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pimpinan yang saya hormati, Para Anggota, Pak Menteri dan Bu Wamen yang selalu setia mendampingi Pak Menteri, para Eselon I dan Jajaran.**

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya memberikan apresiasi atas kerja-kerja 6 bulan dari Kementerian Mendukbangga, terutama di tengah seretnya anggaran, Pak Menteri mempunyai program inovatif namanya GENTING. Saya mencatat di sini, selama 6 bulan sudah ada 20.396 pemberi atau singkatannya di sini disebut mitra. Nah, kami ingin mengetahui sebenarnya, *profiling* dari 20.000 itu apa saja dan siapa saja karena ini penting supaya trennya tidak turun dan landai, tapi terus meningkat. Ini, kan, kecanggihan Pak Menteri, saya kira, kan, berkomunikasi dengan pihak swasta dan BUMN di tengah seratnya anggaran negara. Yang pertama.

Yang kedua, saya sama dengan Pak Charles dan Pak Edy Wuryanto. Perpres 72 Tahun 2021 itu kalau bisa dihidupkan kembali. Ini kan akan berakhir kalau enggak salah bulan Desember, ya, Pak Menteri, ya? Ya, karena tanpa koordinasi dengan kementerian dan K/L yang lain, sulit kita untuk memberlakukan percepatan penurunan *stunting*.

Data saya tahun 2023 itu dari 17 kementerian dan lembaga, ada anggaran 44 triliun, tapi penurunannya cuma 0,1. Saya enggak tahu ini yang salah programnya atau yang salah surveinya karena surveinya cuma satu, ya, kan? Ini penting ini. *Effort*-nya sangat besar, masa, sih, 44 triliun turunnya cuma 0,1, kan enggak masuk akal itu. Seolah-olah pemerintah tidak bekerja, ya, kan? Jadi, ini menurut saya penting. Yang pertama.

Yang kedua, saya lihat di sini paket bantuan yang diberikan itu sudah mencapai 115 untuk nutrisi, akses air bersih 2,6, edukasi pencegahan dan penanganan 22, dan jamban sehat dan rumah layak huni sekitar 959 rumah.

Sebenarnya air bersih dan jamban ini yang efektif itu dianggarkan oleh Menteri PUPR, ya, kan? Maksud saya, kalau koordinasinya sudah berjalan, enggak perlu lagi dilakukan di sini, Pak Menteri, menurut saya. Cukup dilakukan di kementerian yang terkait saja sehingga lebih fokus kepada nutrisi dan edukasi pencegahan sehingga efeknya akan lebih, lebih besar.

Saya melihat apa yang akan dikerjakan Pak Menteri terhadap 10 provinsi tertinggi, prevalensi *stunting*-nya. Ini saya belum melihat di sini, ya, kan, masih umum sifatnya. Satu, Papua Tengah 39,4%, NTT 37,9%, Papua Pegunungan 30,7, Papua Barat Daya 31%, Sulawesi Barat 30,3, Sulawesi Tenggara 30%, Aceh 29,4, Maluku 28,4, dan Sulawesi Selatan 27,4%.

Jadi, kalau 10 daerah ini dilakukan intervensi secara intensif, menurut saya penurunannya akan drastis menurun. Jadi, ini perlu strategi tersendiri, Pak Menteri, ini 10 daerah tertinggi ini. Saya kira, itu yang kedua.

Yang ketiga, bagaimana antisipasi Kemendukbangga dengan penurunan anggaran alkon? Dari 700 miliar sekian, tinggal 100. Jadi, apa kreativitas dan inovasi akan dilakukan untuk mencegah kehamilan? Sekarang ini kehamilan rata-rata, kan, 5 juta per tahun, iya, kan? Dengan anggaran 100 ini cukup apa enggak ini, ya, kan, mencegahnya, ya. Jangan sampai nanti kehamilannya meningkat akibat tidak ada orang yang menggunakan kontrasepsi. Menggunakan kontrasepsi saja banyak yang jebol, apalagi tidak menggunakan kontrasepsi. Jadi, menurut saya ini penting untuk dilakukan. Jadi, antisipasinya apa? Inovasi apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Kemendukbangga dalam rangka mengantisipasi penurunan anggaran yang begitu drastis.

Kemudian yang keempat tentang TPG ini. TPG sudah dibentuk di beberapa daerah, tapi anehnya Jakarta tidak ada ini, Pak Menteri, padahal angka *stunting* di Jakarta masih tinggi, 17,6%. Saya beberapa kali melakukan sosialisasi di Jakarta, saya bertemu dengan teman-teman dari kementerian, dari apa, dari Pemda. Jadi, ini angka *stunting* Jakarta itu masih 17,6%, sementara di sini TPG-nya enggak ada ini. Jadi, koordinasi yang paling dekat tidak ada, bagaimana ini, Pak Menteri? Ya, kan? Jadi, ini menurut saya perlu dilakukan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan

Yang terakhir, keterlibatan Kemendukbangga dalam Program MBG yang sekarang, yang diutamakan pemerintah itu, kan, kepada sekolah. Apakah ke ibu

hamil dan menyusui sudah jalan atau belum? Nah, kalau sudah jalan, lalu peran Kementerian Kemendukbangga itu di mana di sini? Apakah misalnya yang mendistribusi ke ibu hamil, iya, kan? Itu karena transportasinya yang disediakan. Nah, dananya dari mana ini, Pak Menteri, ya? Saya kira itu.

Terima kasih, Bu Putih.

*Wallahulmuwafiq ila aqwamithoriq,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Baik, sedikit dari saya, Pak Menteri. Jadi, terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan, ya. Memang kalau melihat evaluasi data pemerintahan sebelumnya, begitu, ya, periode sebelumnya angka *stunting* itu, kan, turun sekitar 1 sampai dengan 3%, lah, per tahun, ya. Nah, kalau di tahun ini, ya, sudah 20%, maka ya harusnya bisa lebih mudah. Harusnya, ya, bisa mencapai 14% di tahun 2029. Tapi tentu kami berharap BKKBN ini, atau Kemendukbangga, ya, ini bisa lebih optimal lagi, ya, dalam capaian targetnya. Kalau tadi 1 sampai dengan 3% atau per tahun bisa 2%, begitu, ya. Ya, tahun 2029, ya, kami berharap bisa turun sebenarnya dari 14%, begitu, ya, mungkin di angka 10%, ya. Jadi, target 14%-nya bisa dilewati, begitu.

Nah, yang selanjutnya terkait dengan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*. Saya kira, memang secara strategi cukup baik, sudah baik, begitu, ya, tapi rasanya sependapat mungkin dari teman-teman Anggota sebelumnya, ya, kita seperti kehilangan fokus, begitu, ya. Fokus karena, ya, semuanya dikerjakan, ya. Semuanya dikerjakan, tapi dikerjakannya juga sedikit-sedikit, ya, karena memang anggarannya terbatas, begitu.

Nah, ya, saya enggak tahu, mungkin BKKBN bisa menentukan, lah, ya, menentukan titik kritis atau fokus, begitu, kan, *stunting* ini, ya. Kan kalau tadi juga sudah disinggung banyak pakar menyampaikan, ya fokus utama itu ada di 1.000 hari pertama kehidupan, ya, 1.000 HPK untuk *stunting*. Nah, selama ini disebut-sebut, tapi realisasinya, ya, saya lihat memang masih, ya, masih belum cukup, lah, ya, masih biasa saja penekanannya. Jadi, memang harus betul-betul jadi unggulan, jadi prioritas, begitu, ya.

Nah, ini intervensi *stunting* ini, ya. Kami berharap Kemendukbangga bisa fokus di kelompok-kelompok yang memang paling berisiko, ya, paling berisiko dan juga berpotensi terdampak, ya. Nah, untuk itu, kami juga ingin mengetahui, Pak

Menteri dan jajaran, sejauh mana *data surveillance*, nih, *data surveillance*, data Keluarga Risiko *Stunting*, ya, data KRS, ya. Nah, ini digunakan secara aktif, ya, di dalam perencanaan program *stunting*, khususnya di daerah-daerah, ya.

Tadi banyak teman-teman sampaikan, Bu Meli sampaikan, ya, sering kali berdebat kusir dengan daerah, ya. Tapi mudah-mudahan, sih, ke depan enggak lagi, Bu Mel, karena Bu Mel ini sekarang posisinya istri bupati, Ketua PKK. Jadi mudah-mudahan lebih bersinergi, nih, ya, Kemendukbangga dengan Bu Meli, ya.

Yang selanjutnya juga saya berharap juga fokus, ada fokus juga pencegahan-pencegahan ini di daerah-daerah yang memang juga prioritas, begitu, ya, secara persentase maupun secara kuantitas *stunting*-nya tinggi. Jadi, kami berharap ada data yang disajikan, Pak Menteri, terkait distribusi kasus-kasus *stunting* di daerah, ya, baik secara jumlah maupun juga secara persentase mungkin nanti bisa disusulkan.

Dan yang selanjutnya terkait dengan, ya, kesinambungan, ya, kesinambungan program dan juga akses pelayanan keluarga berencana, ya. Strategi apa dari Kemendukbangga untuk bisa menjamin ya keberlanjutan dari Program Bangga Kencana ini, ya. Sepakat memang perlu ada pendekatan-pendekatan kolaborasi apa tadi? *Pentahelix*, ya, tapi tentu harus juga ada harmonisasi kebijakan sektoral, ya, saya kira, untuk bisa mendukung pembangunan keluarga maupun juga dalduknya, ya, pengendalian penduduknya.

Apalagi tadi kalau konteksnya terjadi efisiensi fiskal, ya, di paparan Pak Menteri tadi juga sudah disinggung ada indikator peta jalan, ya, pembangunan, apa, kependudukan dan pembangunan keluarga 2025 sampai dengan 2029 di sasaran yang pertama itu pengendalian kuantitas, ya, penduduk. Jadi, kalau misalnya dikaitkan dengan efisiensi anggaran tahun 2025, ya, mudah-mudahan, sih, ada strategi yang inovatif ini, ya, dari Kemendukbangga. Khususnya, khususnya ini saya menyoroti terkait dengan akses terhadap alat kontrasepsi, ya, karena penggunaan alat kontrasepsi yang berkualitas di kita juga masih di bawah target SDGs 2030, ya, masih 75%, ya.

Jadi, ya dengan efisiensi anggaran penyediaan alkon-nya ini pasti turun, begitu, ya. Ya, kami berharap tentu Kemendukbangga bisa menjamin, menjamin ketersediaan dan juga akses dari alat kontrasepsi yang tetap berkualitas tentunya, tetap aman, ya, dan adil juga merata ini bisa tetap dijaga, lah, ya, oleh Kemendukbangga. Termasuk tentunya, ya memperkuat juga kerja sama kalau memang diperlukan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan akses alkon ini, ya.

Yang selanjutnya terkait dengan penyuluh atau pun juga PLKB. Kami mencoba memahami sebenarnya, ya, terkait dengan kendala-kendala yang memang dihadapi oleh Kemendukbangga, terutama di dalam pemenuhan jaminan sosial dari teman-teman penyuluh, ya, ataupun juga PLKB. Tapi mudah-mudahan ada prioritas, lah, paling tidak, begitu, Pak Menteri, ya, dan ada peningkatan. Saat ini memang sudah ada, ya, sebagian yang memang sudah didaftarkan untuk ikut kepesertaan di dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, tapi mudah-mudahan tetap ada peningkatan, walaupun secara jumlahnya enggak bisa, belum bisa, belum bisa semuanya, ya, karena, kan, tadi kalau disampaikan 200.000 itu sekitar 40 miliaran, ya, dana anggaran yang harus dialokasikan, tapi kami berharap, ya ini tetap ada upaya-upaya, terutama yang diprioritaskan mungkin, yang P3K dulu, begitu, ya, untuk bisa masuk kepesertaan karena mobilitas mereka, kan, cukup tinggi. Risiko-risiko terhadap tugas yang dijalankan saya kira juga cukup tinggi.

Itu saja saya kira, Pak Menteri, dari saya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Menteri untuk bisa menanggapi apa-apa yang tadi sudah disampaikan, baik oleh Pimpinan maupun juga Anggota. Silakan.

Karena tadi sudah disepakati waktu sampai jam 12.00, ya, karena ini tinggal menunggu jawaban, saya alokasikan sampai dengan jam 12.30.

Belum kesimpulan ini.

12.45 boleh, ya? Bapak/Ibu, ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Oke, silakan, Pak Menteri.

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (Dr. WIHAJI, S.Ag., M.Pd):**

Terima kasih atas izin Pimpinan.

Banyak hal yang menurut saya masukan yang luar biasa dari Bapak/Ibu sekalian, yang berkenaan dengan evaluasi raker pada hari ini. Barangkali nanti seandainya ada jawaban yang kurang, nanti jawaban saya dijawab dengan jawaban tertulis yang akan saya sampaikan kepada Ibu Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian yang terhormat.

Yang pertama, dari Ibu Irma. Terima kasih. Problem di lapangan lebih kepada bagaimana pemerintah daerah ikut hadir dan saya setuju itu. Saya kemarin mengisi retreat di seluruh kepala daerah. Salah satu materi saya kemarin

kebetulan kepala daerah itu ada tiga kategori. Ada yang naik kelas dari bupati menjadi gubernur, ada yang *incumbent*, ada yang baru. Yang baru lebih banyak, ya, hampir 60% kepala daerah baru. Karena itu, pada waktu itu, saya kasih pandangan sekaligus informasi yang terbuka bahwa di seluruh pemerintah daerah itu kita punya DAK, DAK fisik dan non fisik. Dan itu kalau kita tidak jelaskan, rata-rata, mohon maaf, kepala daerah tidak tahu bahwa kita ini ada, loh, DAK fisik dan non fisik. Kalau nonfisik ada BOKB yang fungsinya salah satunya untuk TPK, untuk kampung KB, untuk penggerakan KBI maupun untuk pencegahan *stunting*.

Maksud saya begini, tentu saya terima kasih masukannya, Bu Irma. Kemarin dalam retreat itu saya sampaikan, ini, loh, DAK semua. Saya informasikan ke Bapak/Ibu kepala daerah, ini silakan menjadi poin penting ketika kepala dinas yang di bawah kewenangan kepala daerah yang nanti koordinasi dengan penyuluh. Di kita ada tiga, penyuluh KB dan PLKB. Kalau penyuluh kira-kira dulu karena S1 PNS, penyuluh, kemudian di bawah S1 ada SMA yang PNS petugas lapangan. Kemudian ada satu lagi non-ASN yang diangkat oleh pemerintah daerah. Inilah yang hari ini bagian yang saya kira menjadi prioritas.

Saya setuju prioritas yang mau kita pikirkan, khususnya BPJS Ketenagakerjaan. Apa hubungannya Pak Wihaji? Tentu saya setuju bahwa kalau kepala daerah tidak *wise*, tidak *handarbeni*, tentu agak berat karena kita pasukan kita terbatas, 284 juta per hari ini yang harus kita tangani. Yang pasukan kita cuma 600.000 bersama TPK pendamping keluarga. Karena itu, selain retreat, kemarin saya *open*, "Ini loh DAK-nya, Bapak/Ibu, silakan," termasuk ada DAK fisik untuk balai penyuluhan, untuk beli motor yang biru itu ada yang kurang dengan indikator yang sudah kita tentukan.

Kemarin juga kita bikin, perlu saya laporkan, saya kumpulkan seluruh Sekda dan Kepala Bappeda sebelum masuk RPJMD, saya titip. Ini ada program prioritas nasional yang tolong dimasukkan dalam RPJMD. Rata-rata antusias, termasuk saya juga melaporkan kepada Bapak/Ibu, sekarang saya lagi memperjuangkan untuk peroda, perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga nanti urusan Kemendukbangga ini menjadi urusan wajib.

Siapa pun kepala daerah, kita masukkan pasal di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang saya mengerti betul Bapak/Ibu, Pak Heru, Ibu yang Bapak Kepala Daerah dan ini harapannya saya sudah sampaikan, saya laporkan sekaligus saya koordinasikan dengan Kemendagri untuk mengubah Undang-Undang 23/2014 kita dimasukkan menjadi urusan wajib sehingga siapa pun kepala daerah untuk ikut terlibat di urusan Kemendukbangga. Karena saya meyakini urusan kita ini banyak dari hulu sampai hilir semua masuk dalam urusan kita. Karena itu, saya tentu terima kasih, Bu Irma,

saya kira ini masukan yang harus saya perjuangkan dan ini bagian dari strategi komunikasi dengan pemda.

Termasuk saya juga, dulu awal juga tidak tahu bahwa ini adalah ada ASN kementerian yang ditaruh di pemerintah daerah. Semuanya ada, ASN, P3K, dan ASN kementerian yang ditaruh di seluruh kabupaten/kota sebanyak 18.000 sekian itu, semuanya ada. Walaupun ada yang 10, ada yang tergantung besarnya, kalau Kabupaten Bogor misalnya tentu lebih banyak karena jumlah penduduknya banyak. Ada yang 50, ada yang 30 dan ini bagian dari yang tadi barangkali untuk menjelaskan yang dalam konteks ini yang kerja di, kerja di lapangan.

Kemudian yang kedua, harapan saya dari program inti, kemudian saya *mintakan* dimasukkan dalam RPJMD, ada keterlibatan mumpung sebelum 6 bulan. Setelah dilantik, kan, dikasih waktu 6 bulan para kepala daerah, tolong masukkan dalam RPJMD sehingga program-program kita ini masuk. Dan nanti izin saya lapor, saya laporkan minggu depan kita mau rakornas dan rakernas seluruh kepala daerah untuk kita undang, tetapi Zoom karena efektif efisien untuk menyampaikan finalisasi RPJMD sekaligus ada GDPK, *Grand Design* Kependudukan, Pembangunan Kependudukan, yang harapannya nanti semuanya kesulitan kita ini ada *supporting* dari pemerintah daerah karena memang Bapak/Ibu lebih mengerti dan memahami bagaimana kondisi kita sekaligus kondisi daerah. Yang tentu kalau tidak ada *supporting* daerah, pemerintah daerah, tidak akan bisa. Termasuk tentu, mohon maaf, ada tadi termasuk Kabupaten Bandung. Penyuluh yang tidak masuk ASN, namanya TPD (Tim Penggerak Desa) itu dibiayai sendiri. Kalau enggak salah 1 juta, kalau enggak salah di masing-masing pemda beda, tetapi ada yang begini ada yang tidak. Tentu ini berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Untuk selanjutnya mohon maaf kalau tidak, tidak, apa, bisa saya semuanya, tetapi saya beberapa yang sangat penting termasuk tentang Perpres 72. Mohon maaf MBG, dulu, MBG. Bapak/Ibu, ini untuk menjelaskan semua. Saya pada waktu itu mengubah, mencoba mengubah dan memikirkan pakai otak saya bagaimana ini kita menumpang di atas gelombang, kira-kira begitu. Ada MBG sekian.

Kemudian singkat cerita, Bapak/Ibu, saya ketemu Prof. Dadan, ketemu Kepala BGN, saya sampaikan, "Saya punya pasukan 600.000. Bapak punya duit, bagaimana kalau kita kolaborasi?," akhirnya *alhamdulillah* kita sudah sepakat bikin MoU untuk berbagi tugas, khususnya kewenangan Kementerian Kemendukbangga yang berkenaan dengan bagaimana untuk membantu potensi yang dalam hal ini KRS, yang saya, yang kita sebut dengan HPH, HPK. Akhirnya terjadi kesepakatan.

Ada tiga kesepakatan. Satu, saya minta ibu hamil untuk dikasih MBG, saya minta ibu menyusui dikasih MBG, saya minta balita non-PAUD dikasih MBG. Akhirnya sepakat tugas kementerian kita dan saya sudah laporkan kepada Pak Presiden. Satu, mendata ibu hamil, Ibu menyusui balita non-PAUD untuk dikasih MBG. Kedua, mendistribusikan. Karena tidak mungkin tiap hari, mohon maaf, tidak mungkin tiap hari ibu hamil kumpul, ibu menyusui kumpul sehingga kita distribusikan. Siapa yang mendistribusikan? TPK, Tim Pendamping Keluarga. Ada pembiayaan, lagi saya perjuangkan dan *insya Allah* ada. Sudah saya perjuangkan. Nanti tanggal 6 Mei *insya Allah* kita *launching*-kan program ini.

Kemudian yang ketiga, mengevaluasi program ini. Jangan sampai kita sudah antar MBG ke ibu hamil, tadi, yang makan suaminya, yang makan yang lain. Nah, itu yang, yang kita evaluasi. Karena itu, salah satunya sudah sepakat, sudah MoU, sudah PKS, 10% dari SPPG peruntukannya selain anak-anak, untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita non-PAUD. Kenapa PAUD tidak? PAUD sudah ditangani oleh Dikdasmen. Maka kementerian kita ibu hamil, ibu menyusui, balita non-PAUD 10%. Kalau ada 3.500 rata-rata per SPPG maka 350-nya peruntukannya untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Saya berharap ini bisa dijalankan.

Data yang sudah kita kerjakan, Bapak/Ibu, saya laporkan kepada Bapak/Ibu sekalian, dari 1.010 SPPG yang sudah ada, kita sudah ada 180 SPPG yang sudah melaksanakan program ini. Karena itu, saya mungkin kalau turun ke lapangan, yang saya cek pertama pasti SPPG, benar enggak? Sudah dapat info enggak? *Alhamdulillah* BGN sangat proaktif dan semua SPPG sudah dikasih surat dari BGN untuk melibatkan BKKBN dalam melaksanakan distribusi MBG khusus ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD.

Saya laporkan, Bapak/Ibu, ibu hamil yang sudah dikasih per hari ini, per hari 3.205. Ibu menyusui 4.063, balita non-PAUD 10.045. Itu setiap hari se-Indonesia, walaupun, mohon maaf, belum semuanya ada SPPG. Tentu saya akan menyesuaikan karena ini *leading sector*-nya Prof. Dadan, saya mengikuti di situ ada SPPG, saya menitip 10%-nya tolong ibu hamil, ibu menyusui. Ini bagian dari, tadi, gerakan tambahan, tapi *insya Allah* manfaat karena memang keterbatasan kita.

Kemudian, Bapak/Ibu, termasuk Pak Nurhadi, perlu enggak, Perpres 72? Saya sangat butuh. Saya sangat butuh dalam konteks penanganan komprehensif. Kita sudah pernah bahas berkali-kali, kemudian memang terjadi diskusi, lah, dinamika, intinya sudah, siapa pun yang di depan, saya *it's ok*. Saya pembantu presiden, silakan siapa pun yang di depan. Nah, saya tidak akan membahasakan. Siapa pun yang di depan *it's ok*, yang penting saya titip program ini.

Apa urusannya, Pak Wihaji? Bahwa Perpres ini untuk memastikan kinerja komprehensif. Karena *stunting* ini seperti masukan Bapak/Ibu sekalian, tidak bisa sendirian. Kata Pak Menteri Kesehatan, "Mau saya kasih asupan tiap hari, kalau pernikahan dini masih ada, ya, *stunting*. Saya pernikahan oke, masukan oke, tapi sanitasi air bersih enggak ada, *stunting*," nah kira-kira begitu. Nah, ini kalau, inilah kementerian kita yang, mohon maaf, saya sampaikan kepada menteri-menteri lain bahwa kita ini bukan Bappenas, bukan perencanaan, kita juga bukan Menko, tapi kita ini mengkoordinasikan banyak hal, sekaligus pelaksana.

Jadi, itulah yang kita kerjakan pada hari ini, yang tentu harapannya kalau ditanya, apa itu, perlu enggak? Saya perlu karena ini bagian dari kira-kira ada dasar yang kuat, walaupun saya tetap bikin kegiatan lain yang saya sebut Genteng, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*, ini untuk menjawab supaya tidak tergantung kepada APBN. Maka saya ini, inisiasinya, izin, Bapak/Ibu, inspirasinya dari survei bahwa orang Indonesia 82% menjadi orang dermawan nomor satu di dunia.

Dari 82%, 63%-nya adalah membantu yang tidak kenal. Maka, saya minta orang tua asuh nanti saya jelaskan, Pimpinan, Pak Yahya, bahwa di situ ada semuanya. Siapa namanya, ada yang korporasi, ada yang BUMN, ada yang perorangan. Hampir seluruh penyuluh ASN jadi orang tua asuh. Hampir semuanya, walaupun 10 orang mengasuh satu anak. Karena saya sampaikan kita menolong satu anak lebih manfaat sampai nanti baduta selesai, daripada banyak, tapi tidak fokus. Hampir semuanya ada yang BUMN, kayak PTPN, PTPN membantu air bersih, di situ ada perkebunan, ada beberapa titik yang butuh air bersih. Saya minta beliau, *oke*.

Kemudian ada korporasi lain, termasuk saya sampaikan di Sulawesi Tenggara itu banyak nikel-nikel besar itu, "Sebagian penduduk masyarakatnya juga masih ada yang *stunting*, tolong, dong, bantu," kira-kira begitu bagian dari ikhtiar yang disampaikan oleh Pak Nurhadi. Saya kira seperti itu. Kalau ditanya butuh, saya butuh.

Kemudian rasio tenaga PLKB, tentu harapan kita lebih banyak, lebih bagus, *up*, tapi efektif, efisien. Sekarang yang lebih banyak bekerja lebih pada TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang selama ini 600.000 itu. Kalau penyuluh terbatas, misalnya satu kabupaten 50 enggak bisa, enggak bisa secara langsung bisa menyelesaikan lini lapangan. Termasuk misalnya kemarin kita melaksanakan vasektomi, ya rata-rata yang bekerja, ya, TPK, ke bawah, sosialisasi, jemput, kemudian menjelaskan bahwa sampai ke, ke lokasi dipulangkan lagi itu TPK, luar biasa dan kasih sanga 450.000. Kemudian Jawa Barat oleh Pak KDM, beliau *campaign*, ya saya senang, sih, saya gembira, saya, saya senang, terima kasih. Katanya beliau mau kasih juga nanti kalau ada yang lain, cuma masalahnya

pembiayaannya ini terbatas. Tahun 2025 kita ini cuma 2.000 sekian dari, nanti saya jawab sekaligus peruntukan dari alkon.

Bapak/Ibu, saya, sih, yakin, saya sudah menjelaskan kepada, mohon maaf, melalui Pak Sesmen untuk menjelaskan kepada Menteri Keuangan. Ini risiko kalau alkon enggak dipenuhi, dalam tanda petik, terjadi peledakan penduduk. Nanti kalau peledakan penduduk maka terjadi peningkatan subsidi. Kemudian saya hitung semua matematikanya, maka kita akan menghemat sekian dan itu sudah diyakinkan *insya Allah* kita diminta untuk memberikan laporan mana yang prioritas, *insya Allah* akan dipenuhi. Karena itu, saya, sih, yakin pasti ini enggak ada masalah. Walaupun ini *plan A*, *plan B*-nya tetap edukasi mana yang mandiri, mana yang urusan wajib karena saya prioritaskan, *oke*, yang belum beruntung, yang kurang beruntung itu menjadi prioritas. Termasuk nanti hubungannya dengan prioritas *stunting* juga begitu, Pimpinan.

Saya lagi bikin, bukan, bukan *file project*, tetapi hari ini saya kerja sama dengan perguruan tinggi beberapa perguruan tinggi, kemudian Kemendikbud, kemudian kementerian yang lain untuk di NTT. Kita mulai *start*, sudah kita *start*, ada beberapa percontohan yang nanti kita libatkan *pentahelix* Menteri Pendidikan Tinggi karena kampus-kampusnya mau diturunkan di sana, kemudian perguruan tinggi, mohon maaf, Universitas Muhammadiyah Malang, Unibra, kemudian Pak Gubernur, kemudian ada korporasi yang saya keroyok di sana. Tetapi walaupun misalnya di sana itu bagus, kalau Jawa Barat masih tinggi karena itu pasti akan tinggi. Kenapa? Karena jumlah penduduk paling banyak itu Jawa Barat, 50 juta. Maka dua hal pendekatan kualitatifnya di NTT, pendekatan kuantitatifnya di Jawa Barat karena jumlah penduduknya paling tinggi. Apakah yang lain? Yang lain tetap, lah, saya tetap akan kerja untuk semuanya.

Kemudian, Bapak/Ibu, termasuk Bu, Pak, Ibu Eko tentang masukan-masukan yang berkenaan dengan langkah-langkah konkret, yang tadi saya sampaikan, tetapi kira-kira begini. Kalau pun ada, apa namanya, problem-problem tadi internet dan sebagainya, saya juga sudah koordinasi dengan Menkomdigi, Bu Meutya, saya minta juga untuk MoU ada fasilitas-fasilitas yang hubungannya dengan kementerian kita tolong difasilitasi. Sudah, saya sudah koordinasi, ini tinggal tindak lanjut untuk saling koordinasi dan komunikasi antarkementerian karena saya terus meminjam bahasanya Pak Menko, bagaimana saya koordinasi dengan menteri terkait berkenaan dengan program-program kementerian kita, termasuk Menteri Desa, saya titip anggaran dana desanya.

Kemudian dengan Menteri Sosial, saya titip DTSEN-nya. Kemarin saya sudah sampaikan semuanya, Menteri Dikdasmen sampaikan, Menteri Agama juga sudah saya sampaikan sehingga ini bagian dari, ya, *pentahelix* dan harus dikeroyok ramai-ramai.

Pak Heru, saya kira masukan dengan stimulus tadi penting, ya, stimulus, kemudian untuk memancing. Karena itu, tadi pas retreat, Pak Bupati, Pak Wali Kota ini dari pemerintah pusat ada DAK, ada non fisik, ada fisik, tolong bantu saya untuk program-program masukkan ke dalam RPJMD. Termasuk barangkali di masing-masing pemerintah daerah, *cover* sangat berpengaruh, Pak Heru, *cover*. Kalau yang kreatif pasti terus meyakinkan kepada bupati, tapi kalau enggak kreatif, wah itu agak repot. Karena itu saya terima kasih kayak Jawa Timur, bagus, kreatif, keliling, walaupun tadi kritiknya memang tim pengendalinya masih kurang banyak. Terima kasih, nanti masukannya biar menjadi masukan saya untuk tim pengendali segera dibentuk, biar ini untuk mempercepat program kita, termasuk yang disampaikan oleh Pak Heru. Yang lain saya kira masukan, Pak, masukan.

Kemudian, ya, kalau beliau paham. Masalahnya kalau, mohon maaf, Surabaya, ya, Surabaya ini duitnya banyak, Bu. Saya sudah komunikasi langsung dengan kepala dinasnya, dengan pimpinannya, sama orang-orang lapangannya. Saya sudah mau belajar, kan, ada dua, Surabaya dan Sumedang yang dianggap bagus itu. Ternyata di sana empat puluh berapa ribu orang itu digaji, insentif 500.000, tapi banyak orangnya. Kita hitung itu puluhan miliar untuk dari APBD-nya. Jadi, tidak semua kami, pemerintah daerah mampu.

Jadi, kalau Surabaya yang bisa mengimbangi mungkin, mana, ya, Bojonegoro itu mungkin yang PAD-nya tinggi, ya, karena sumur minyak misalnya, atau kota-kota besar, lah, begitu, kira-kira. Jadi, saya kira, untuk itu butuh, butuh *effort* untuk menjawab yang saya kira tadi menjadi masukan.

Kemudian kampung KB, 5 menit lagi. Kampung KB, ini yang saya mau teruskan karena ini kayaknya instruksi presiden. Cuma saya begini, Bu, banyak program kita itu pendekatannya kontestasi. Saya mau mengubah kontestasi, termasuk GenRe, GenRe banyak kontestasi. Padahal bukan itu semangatnya. Kalau kontestasi hasilnya pasti kontes, *suwer*. Nanti ada GenRe kabupaten, GenRe kecamatan, GenRe desa, tapi lebih banyak kontestasi. Kurangi kontestasi, lebih ke inti. Intinya apa? Memberikan teladan dan terus menginspirasi untuk generasi seangkatannya, 14 sampai 24 tahun. Bagaimana memastikan untuk tidak narkoba, kemudian tidak seks bebas dan tidak melakukan pernikahan dini. Apa hubungannya dengan alat kontrasepsi tadi? Ya, saya lebih pendekatan ke hati-hati dan GenRe menjadi pas, apanya, tim paling depan, lah, untuk mengurangi pernikahan dini. Termasuk nanti GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia) karena ini harapannya untuk memberikan edukasi kepada generasi penerusnya.

Jadi, Bu Teti, saya terima kasih bahwa, apa, Kampung KB, termasuk nanti *quick win* fokuskan ke situ. Satu lagi nanti saya bikin, *insya Allah*, mohon doanya,

sekolah keluarga berencana, itu untuk menjawab semua problem di kementerian kita.

Kemudian, Pak Wuryanto sudah tadi yang berkenaan dengan butuh enggak, Perpres, ya, saya izin, kalau ditanya sangat butuh sekali. Untuk SPPG sudah, MBG sudah.

Kemudian struktur, tadi sudah saya kira, jelaskan tipis-tipis bahwa kita itu sampai ke kabupaten/kota punya ASN semua, ASN ada yang penyuluh, ada yang petugas. Komunikasi setuju, kalau kita enggak baik komunikasi dengan kepala daerah, memang, ya, agak repot, pasti repot. Selain repot, ya, semuanya perlu waktu sehingga nanti, ya, kalau bahasa *kasarannya* harus komunikasi baik-baik, lah, *ngelondoh*, bahwa mengalah, kemudian kita jelaskan. Ini ada kementerian yang menangani dan ada di kewenangan Bapak, dan rata-rata kalau kita jelaskan, sih, *oke*, kalau kita jelaskan.

Kemudian tentang Ibu Lucy, sudah, ya, tadi kira-kira karena tadi kalau Surabaya kemampuan keuangannya *oke*, dari 1,7%, *oke*. Karena itu, ya, kalau masalah PIK R datanya nanti saya kasih, data berapa, sih, PIK R-nya, Surabaya, ada semua di kabupaten, di kabupaten/kota nanti di jawaban tertulis kita sampaikan.

Kemudian Ibu Sri, terima kasih masukan termasuk PLG, PLKB di lapangan, yang paling penting tentu edukasi kemudian data.

Inilah yang mau saya rapikan juga. Semoga dengan adanya instruksi Presiden Nomor 4 Tentang DTSEN. Semoga nanti juga akan mengubah semuanya yang berkenaan dengan *input* data, termasuk survei. Ini yang benar yang mana SSGI, SKI atau apa? Ini yang saya juga sampaikan sehingga nanti ketemu antara mana yang disurvei, mana yang dilakukan.

Bapak/Ibu, tantangan dan sebagainya, tentu ini memang beda. Termasuk, mohon maaf, yang adat tadi, tentu nanti saya koordinasikan, Bu, karena memang kewenangan di Kemendagri, tapi enggak apa-apa, kalau kementerian kita ini soalnya semuanya terkait. Jadi, kalau, kementerian kita semuanya terkait. Nanti saya sampaikan ke Pak Mendagri yang berkenaan dengan kondisi kependudukan dalam konteks, apa namanya, negara hadir. Kalau kementerian kita ini, kan, dua, mencegah dan mengubah perilaku. Itu tugas Kementerian Kemendukbangga, mencegah dan mengubah perilaku.

Maka untuk yang tadi, nanti tentu juga berpengaruh. Kalau enggak diakui ya, bagaimana mau mengubah perilaku, kan? Kira-kira begitu. Jadi, tetap ada hubungannya, Bu. Nanti saya sampaikan.

Pak Charles, terima kasih masukannya terkait perpres. Kemudian Cak Yahya, *profiling*-nya nanti, ada, Cak Yahya? Pak Pimpinan? Mohon maaf, Pimpinan, yang nanti datanya kita sampaikan secara tertulis.

Saya kira itu. Pas, jam satu kurang empat lima.

Masukan dari Ibu Ketua, Ibu Pimpinan, terima kasih. Tentu nanti tentang hal-hal yang berkenaan dengan alkon sudah saya sampaikan karena berpengaruh. Saya sampaikan juga bahwa kalau enggak hati-hati, ya, repot nanti peledakan penduduknya agak lumayan.

Yang terakhir, data kita, Bu Ketua Pimpinan, GENTING lebih ke fokus kepada KRS. Jadi, saya minta memang kemarin data itu saya obrak-abrik lagi. Yang tidak KRS dalam hal 1.000 hari kehidupan, 1.000 hari pertama kehidupan, saya minta dikeluarkan datanya karena saya lebih fokus *stunting* itu dari hulunya. Dan data yang dulu banyak, mungkin akan turun dan sekarang sudah bagus lagi. Termasuk dulu data yang saya sampaikan tentang orang tua juga mengecil. Kalau dulu 100 orang tua asuh itu dianggap 100, cuma sekarang karena 100 orang mengasuh 10, kita, kita kurangi menjadi 10 orang tua asuh, kira-kira begitu. Jadi, basisnya adalah KRS. Jadi, basisnya adalah KRS dan kemudian dari itu prioritasnya adalah HPK.

Saya kira itu, Ibu Pimpinan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Untuk yang lain nanti saya jawab secara tertulis.

Terima kasih.

Saya kembalikan ke Pimpinan.

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

Terima kasih, Pak.

**F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHOJONO, M.M.):**

Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

Ya, silakan Pak Heru.

**F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHHONO, M.M.):**

Satu saja, Pak, Pak Menteri. Yang gagal pascapelayanan. Ya, yang banyak (suara tidak jelas)

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (Dr. WIHAJI, S.Ag., M.Pd):**

Siap. Terima kasih masukannya.

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

Iya. Baik, terima kasih.

Selanjutnya kita masuk ke dalam draf kesimpulan, Bapak/Ibu sekalian, tolong ditampilkan, Sekretariat.

Draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX dengan Kemendukbangga pada hari ini, Rabu 30 April 2025. Saya bacakan satu persatu dan kesempatan pertama, saya berikan ke Bapak/Ibu Anggota dulu, ya, untuk bisa mengoreksi draf ini.

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) untuk melakukan penyusunan ulang strategi dan penguatan kualitas intervensi percepatan penurunan *stunting* dengan:
  - a. Mengkaji Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* untuk disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kemendukbangga/BKKBN;
  - b. Memprioritaskan intervensi pada kelompok sasaran yang berisiko dan memiliki potensi terdampak;
  - c. Mengoptimalkan pemanfaatan data *surveillance* dan Keluarga Risiko *Stunting* sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan;
  - d. Menjamin integrasi program Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS) ke dalam RPJMD, RKPD, dan APBD dengan pendekatan berbasis bukti dan partisipatif; dan
  - e. Memperkuat kelembagaan dan fungsi koordinasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dan tim pengendalian GENTING di tingkat pusat dan daerah.

Mohon koreksi, Bapak/Ibu Anggota, terkait dengan kesimpulan pertama poin A sampai dengan E. Adakah yang perlu ditambahkan, atau bisa disetujui, Bapak/Ibu?

Setuju? Setuju, ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

2. Komisi IX DPR RI mendesak Kemendukbangga/BKKBN untuk mendukung penguatan Program Bangga Kencana dan Generasi Berencana (GenRe) sebagai pilar utama pembangunan keluarga dan pengendalian kuantitas penduduk, melalui:
  - a. Pengendalian angka kelahiran untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk dan optimalisasi bonus demografi;
  - b. Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga berbasis pendekatan siklus hidup.

Bisa disetujui, Bapak/Ibu Anggota?

Setuju, ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

3. Komisi IX DPR RI mendesak Kemendukbangga/BKKBN untuk meningkatkan kesejahteraan melalui perlindungan sosial ketenagakerjaan, kapasitas dan distribusi yang proporsional bagi tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) agar pelaksanaan program dapat menjangkau wilayah binaan secara merata dan memperkuat kualitas layanan di lapangan.

Bagaimana, Bapak/Ibu, poin 3 bisa kita setujui?

Setuju, ya? Oke.

**(RAPAT: SETUJU)**

4. Komisi IX DPR RI mendesak Kemendukbangga/BKKBN untuk menjamin keberlanjutan program melalui penguatan ekosistem kolaboratif dan layanan KB yang inklusif, dengan:
  - a. Melakukan harmonisasi kebijakan sektoral yang berpihak pada pembangunan keluarga dan kependudukan berkelanjutan;
  - b. Menguatkan peran serta masyarakat, mitra kerja, dan sektor swasta dalam pelaksanaan program (*pentahelix*); dan
  - c. Menjamin ketersediaan dan akses terhadap layanan kontrasepsi yang berkualitas, aman, dan nyaman khususnya dalam situasi efisiensi fiskal guna melindungi hak reproduksi dan memastikan pelayanan KB yang adil dan merata.

Setuju, poin 4, Bapak/Ibu sekalian?

Setuju, ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

5. Komisi IX, terkait dengan jawaban tertulis paling lambat tanggal 8 Mei 2025.

Saya kira, disetujui.

Selanjutnya kepada Saudara Menteri Kemendukbangga, silakan dilihat poin 1 sampai dengan poin 5, ya. Jika memang ada koreksi penambahan atau pun pengurangan, kami persilakan.

Untuk poin 1 terlebih dahulu, Pak Menteri?

Baik, setuju, ya.

Poin dua?

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (Dr. WIHAJI, S.Ag., M.Pd):**

Setuju.

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

Setuju, oke.

Untuk kesimpulan ketiga?

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (Dr. WIHAJI, S.Ag., M.Pd):**

Setuju.

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI) :**

Setuju, ya.

Empat?

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (Dr. WIHAJI, S.Ag., M.Pd):**

Setuju.

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

Setuju.

Lima, setuju juga, Pak Menteri, ya?

Baik, jadi dengan adanya kesepakatan, ya, persetujuan terkait dengan rumusan kesimpulan ini. Jadi, sekali lagi, kami meminta kesimpulan, ya, apa, persetujuan dari rumusan kesimpulan ini menjadi keputusan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada hari ini, ya.

Akhirnya, tentunya kami atas nama Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi IX yang hadir pada hari ini, mengucapkan terima kasih pada Kementerian Kemendukbangga, ya, beserta seluruh jajaran, ini hadir lengkap saya kira. Dan mohon maaf bila memang ada hal-hal yang kurang berkenan selama berjalannya rapat pada hari ini.

Sebelum rapat kami akhiri, kami persilakan Pak Menteri untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai penutup.

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (Dr. WIHAJI, S.Ag., M.Pd):**

Atas izin Pimpinan.

Yang pertama, terima kasih pada hari ini Ibu Pimpinan, Bapak Pimpinan, para Anggota Komisi IX yang saya kira sangat luar biasa men-*support* kementerian kita dan tetap kita minta *support*-nya, *wabil khusus* dukungan Perpres 72, saya minta khusus untuk dukungan dari Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang berkenaan dengan *sustainable* untuk penanganan *stunting*. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, terima kasih.

Dan tentu untuk hal-hal lainnya, nanti kita tindaklanjuti hal yang menjadi kesepakatan pada hari ini. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Pimpinan.

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

Baik. Terima kasih, Pak Menteri.

*Insy Allah* tentu kami sama-sama berkomitmen untuk bisa terus mendukung, ya, Kemendukbangga sebagai salah satu mitra kerja Komisi IX.

Selanjutnya karena tadi kita sudah awali rapat kerja kita pada hari ini dengan berdoa. Jadi, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa kembali menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing.

Berdoa dimulai.

**(RAPAT: BERDOA)**

Selesai.

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* rapat kerja pada hari ini saya akhiri.

*Wabilahitaufiq walhidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.51 WIB)**

**a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT**

**Ttd.**

**Ida Nuryati, S.Sos., M.A.  
NIP.197604011998032002**